PENGARUH GERAKAN MAHASISWA TERHADAP UPAYA PENEGAKAN DEMOKRASI DI THAILAND PADA MASA PEMERINTAHAN PM PRAYUTH CHAN-OCHA (2014-2020)

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

AKMAL MAULANA AR

(18323103)

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

PENGARUH GERAKAN MAHASISWA TERHADAP UPAYA PENEGAKAN DEMOKRASI DI THAILAND PADA MASA PEMERINTAHAN PM PRAYUTH CHAN-OCHA (2014-2020)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

AKMAL MAULANA AR

(18323103)

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH GERAKAN MAHASISWA TERHADAP UPAYA PENEGAKAN DEMOKRASI DI THAILAND PADA MASA PEMERINTAHAN PM PRAYUTH CHAN-OCHA (2014-2020)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

23 April 2022

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Mohammad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.	
2	Gustrieni Putri, S.IP., M.A.	
3	Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.Int.Rel	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan dan termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 07 Januari 2021



Akmal Maulana AR

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan untuk:

Bapak Muh. Arsyad and Ibu Nikmatan

Terima kasih atas kasih sayang, doa, motivasi, harapan, pemahaman, kesabaran, dan nasihat yang selalu kalian berikan

Adik Agunawan Mahesa AR dan Adik Azza Rizkia Putri

Terima kasih atas doa serta dukungan yang kalian berikan

Rekan – rekan HI UII Angkatan 2018

Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama perkuliahan di Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia

HALAMAN MOTTO

"*The future is in your hands and you are the one who decide, not others. So be confident!"*

(Akmal Maulana AR)

"*Don't say you don't have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein.!"*

(H. Jackson Brown Jr)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanallahuwa ta ta'allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat, karunia, dan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. Penulis menyadari bahwa lahirnya karya sederhana ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak, sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi dengan hasil yang baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak rasa syukur dan terima kasih atas berbagai bentuk dukungan dan bantuan baik berupa moril dan meteril. Tak terhitung pengalaman serta ilmu yang penulis dapatkan selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ditengah jenuhnya situasi pandemi.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hangga Fathana, S.IP., St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
5. Mohammad Rezky Utama, S.I.P., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, serta bantuan yang bapak berikan dalam proses penyelesaian tugas akhir ditengah kesibukan dan

keseharian bapak. Selama berlangsungnya bimbingan baik melalui zoom maupun whatsapp, saya selalu merasa bangga dan juga selalu mendapatkan ilmu baru, terutama dalam hal berbahasa asing. Terimakasih atas segala bentuk motivasi, ilmu dan saran yang bapak sampaikan sehingga membuat diri ini merasa semakin percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Semoga kebaikan bapaki dibalas oleh Allah SWT.

6. Gustrieni Putri, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Terimakasih atas bimbingan, dampingan, dan saran yang telah diberikan selama studi saya di HI UII. Tidak pernah sekalipun saya merasa tersesat dikarenakan ibu senantiasa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kami. Saya begitu senang melakukan interaksi dengan ibu disaat ada hal yang perlu saya tanyakan atau diskusikan sehingga tidak sekalipun saya berada pada posisi yang membingungkan. Terimakasih banyak Bu, semoga ibu selalu bertemu dengan orang-orang baik dan kebaikan ibu akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Berkat pengorbanan, ketulusan, kebaikan, dan ilmu pengetahuan yang Bapak dan Ibu berikan, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Mbak Mardiatul Hasanah selaku staff prodi HI UII yang selalu membantu kami dengan kesabaran, baik dalam urusan-urusan akademik dan juga membantu dalam masalah

penyelesaian skripsi ini. Semoga program studi HI UII akan selalu sukses dan membanggakan dari segi kualitas pendidikan yang diberikan.

8. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan saya dukungan, kasih sayang, dan juga memahami apa saja yang saya harapkan. Terima kasih karena selalu menjadi orang tua yang paling saya banggakan dan menjadi teman diskusi dalam segala hal. Tanpa dukungan kalian, perjalanan saya di masa kuliah dan menyelesaikan tugas akhir akan terasa lebih berat dan penuh rintangan.
9. Kepada kedua adik saya Agunawan Mahesa AR dan Azza Rizkia Putri, terima kasih karena selalu mendukung saya setiap saat.
10. Kepada sahabat saya, Hayuningrum Citra Maharsi dan Nadia Fatin Hakim, terima kasih karena menjadi rekan saya dalam berbagai macam ujian kehidupan selama ini. Terima kasih selalu ada disaat saya suka dan duka, terima kasih selalu menjadi partner disegala situasi. Kehangatan dan keceriaan kalian adalah kenangan yang begitu indah dimasa kuliah.
11. Kepada dua insan berilmu saya Rayhan Maulana Pangestu dan Derina Faslig Silitonga, terima kasih karena menjadi sahabat dan juga tutor yang baik bagi saya. Terima kasih atas dukungan serta bantuannya selama ini. Meskipun kita beda generasi di HI, namun kalian sangat berjasa sebagai tutor, teman cerita, dan masih banyak lagi. Terimakasih untuk selalu ada.
12. Kepada teman lemot saya, Fahriza Putra Permana dan Nabilah Dianza Zain, terima kasih karena menjadi manusia yang sabar selama ini dalam menghadapi saya. Semoga kedepannya bisa berpikir sat set sat set

sehingga tidak ketinggalan banyak hal. Terima kasih karena sudah jadi teman khususnya dalam bidang fashion.

13. Kepada teman belajar saya Nadiyah Kholilah Yahya, Ari Septian Putri, Muhammad Maulidan, Alifya Kasih, Dimas Surya, dan Gufron Ghozali yang telah membantu saya dalam belajar, menjadi tim untuk berkembang bersama, dan selalu meramaikan kelas ketika sedang berkuliah. Terimakasih karena selalu menjadi motivasi untuk saya selama berkuliah. Kita hebat karena kita PBBA.
14. Kepada sahabat saya di HI UII, Safira Tazkia, Dheva Kharismasih Widani, Rahayu Bonaventura, Vallentiana Puspita, Adnin Fauziah, Panji, dan Atifa Zakiah yang selalu menjadi sahabat terbaik selama kuliah dan mendukung segala pilihan dan jalan yang saya lewati.
15. Kepada sahabat jauh saya Alvin yang selalu mendukung saya dalam segala hal, terima kasih banyak karena selalu memberikan kata-kata positif untuk saya dan selalu menjadi sosok yang ceria.
16. Kepada keluarga saya di AstaBhumi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena tetap menjadi keluarga saya dimanapun saya berada.
17. Kepada keluarga saya di Cosmost yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena tetap menjadi keluarga saya dimanapun saya berada.
18. Kepada teman-teman di HI UII Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena menjadi teman baik saya selama berkuliah di HI UII.

19. Kepada semua kaka tingkat dan juga semua teman saya dimanapun kalian berada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak karena sudah mendukung dan menyayangi saya begitu tulus.

DAFTAR ISI

SKRIPSI ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR ..... **xiv**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xv**
ABSTRAK ..... **xvi**
ABSTRACT ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Signifikasi Penelitian 5
1.5 Cakupan Penelitian 7
1.6 Tinjauan Pustaka 8
1.7 Kerangka Konseptual 13
1.8 Metode Penelitian 18
1.8.1 Jenis Penelitian 18
1.8.2 Subjek Penelitian 18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 19
1.8.4 Proses Pengumpulan Data 19
BAB II PERAN GERAKAN MAHASISWA DALAM MERESPON PERMASALAHAN DEMOKRASI DI THAILAND **21**
2.1 Junta Militer sebagai Aktor Utama Eskalasi Konflik 21
2.2 Munculnya Kelompok Baju Kuning dan Baju Merah sebagai Bentuk Perlawanan 25

2.3 Keterlibatan Mahasiswa, Media, hingga NGO/Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Upaya Penegakan Demokrasi di Thailand 28
2.4 Tujuan dari Gerakan *Mahasiswa* 32
2.5 Dampak dari Pergerakan *Mahasiswa* 33
BAB III ANALISIS TEORI TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK TERHADAP UPAYA PENEGAKAN DEMOKRASI DI THAILAND 35
3.1 Tindakan Represif dari Negara (*Represieve State*) 37
3.2 Respon Mahasiswa Terhadap Tindakan Represif Negara (*Domestic Activists*) 38
3.2.1 *Information Politics*/Politik Informasi 38
3.2.2 *Symbolic Politics/Politik Simbolik* 42
3.2.3 *Leverage Politics*/Politik Pengaruh 46
3.2.4 *Accountability Politics/*Politik Akuntabilitas 50
3.3 Lese Majeste Sebagai Penghambat Pergerakan Mahasiswa (*Blockage*) 51
BAB IVPENUTUP 54
4.1 Kesimpulan 54
4.2 Rekomendasi 57
DAFTAR PUSTAKA 59

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar 1. Boomerang Pattern (Three Level of Transnational Activism)..... 15
Gambar 2. Boomerang Pattern (Three Levels of Transnational Activism) 36
Grafik 1. Persebaran Topik Penggunana Tagar #FreeYouth di Twitter 40
Diagram Lingkaran 1. Persebaran Topik Penggunaan Tagar #*FreeYouth* di Twitter 41

DAFTAR SINGKATAN

NCPO : *The National Council for Peace and Order*
TAN : *Transnational Advocacy Networks*
UDD : T*he United Front for Democracy against Dictatorship*
PAD : *People's Alliance for Democracy*
PP : *People's Power Party*
FYM : *Free Youth Movement*
NGO : *Non-Governmental Organization*
UFTD : *United Front of Thammasat and Demonstration*
OHCHR : *Office of the High Commissioner for Human Rights*
PM : Perdana Menteri
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
PBB : Perserikatan Bangsa Bangsa
KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ABSTRAK

Sejak Thailand mengalami transisi bentuk pemerintahan dari yang sangat tersentralisasi pada zaman kerajaan hingga mengadopsi bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Sejak saat ini hampir di setiap kepemimpinan di Thailand didominasi oleh militer. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik baik dalam aspek politik, sosial, dan budaya. Konflik ini menggiring masyarakat sipil untuk turut terlibat dalam menyalurkan tuntutan-tuntutannya terkait demokrasi yang seharusnya mereka dapatkan sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari gerakan masyarakat sipil, khususnya mahasiswa dalam menegakkan demokrasi di Thailand pada masa pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha tahun 2014-2020. Dalam melihat respon dari gerakan mahasiswa ini, penulis menggunakan pendekatan TAN (Jaringan Advokasi Transnasional). Melalui teori ini penulis melihat bagaimana pengaruh yang dilakukan oleh mahasiswa melalui empat variabel yaitu politik informasi, politik simbol, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas. Adapun hasil penelitian menunjukan pengaruh pergerakan mahasiswa yang terjadi di Thailand dengan menggunakan ketiga strategi yaitu politik informasi, politik simbol, dan politik pengaruh berlangsung efektif. Sayangnya pada strategi keempat yaitu politik akuntabilitas belum efektif dikarenakan adanya hambatan melalui hukum lese majeste.

Kata Kunci: *civil society, mahasiswa, Thailand, Jaringan Advokasi Transnasional, militer junta, monarki.*

ABSTRACT

Since Thailand experienced a transition from a highly centralized form of government during the royal era to adopting a constitutional monarchy form of government. Since now almost every leadership in Thailand is dominated by the military. This is what triggers conflict in the political, social, and cultural aspects. This conflict led civil society to get involved in channeling their demands related to democracy which they should get as a country that implements a democratic system. So this study aims to see how the efforts of the civil society movement, especially students in upholding democracy in Thailand during the reign of PM Prayut Chan-ocha in 2014-2020. In looking at the response of this student movement, the author uses the TAN (Transnational Advocacy Networks). Through this theory, the writer looks at how the efforts made by students through four variables are information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. The results of the study show that the student movement efforts that occurred in Thailand by using three strategies, namely information politics, symbolic politics, and leverage politics are effective. Unfortunately, the fourth strategy, namely accountability politics has not been effective due to obstacles through the lese majeste law.

Kata Kunci: *civil society, students, Thailand, Transnational Advocacy Network, military junta, monarchy.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menerapkan bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional di mana Raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Thailand juga mengadopsi sistem demokrasi yang memiliki sejarah panjang, di mana Thailand mengalami transisi bentuk pemerintahan dari yang sangat tersentralisasi pada masa Kerajaan Sukhothai (1238-1350) yang memerintah secara paternalistik, Kerajaan Ayutthaya (1350-1767) secara otokratis, dan Pemerintahan Chakri (1782-Sekarang) yang dipimpin Raja Rama I. Masyarakat Thailand percaya bahwa Raja adalah reinkarnasi dari Dewa, kepercayaan ini menjadi elemen penting penghormatan yang diberikan rakyat kepada Rajanya. Kemudian Thailand mengalami perubahan bentuk pemerintahan yang dulunya Monarki Absolut menjadi Monarki Konstitusional pada tahun 1932. Transisi dari Monarki Absolut menjadi Monarki Konstitusional tidak memberikan perubahan pada masyarakat Thailand secara fundamental, dikarenakan kekuasaan yang awalnya tersentral kepada Raja kini berpindah ke tangan para petinggi birokrasi dan kepemimpinan militer. Dalam rentang waktu 88 tahun sejak Thailand menerapkan Monarki Konstitusi sebagai bentuk pemerintahannya hingga sekarang sebagian besar kekuasaan di Thailand didominasi oleh militer (Neher, 1996, p. 307-308).

Dominasi militer di Thailand pada tahun 1940-an akhir sangat menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan hingga tahun 1950-an, Thailand mengalami serangkaian kudeta, korupsi, dan impotensi parlemen. Kudeta

dilakukan militer yang dipimpin oleh Jenderal Besar Sarit Thanarat pada tahun 1958 (Connors, 2007, p. 44). Sejatinya kudeta selalu mewarnai perpolitikan Thailand setiap tahunnya dan sudah menjadi norma bagi perubahan kepemimpinan politik dan pemerintahan di Thailand sejak 1932 (Bunbongkarn, 2004, p. 48). Cikal bakal periode demokrasi lahir ketika 1973-1976 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh *civil society* untuk menggulingkan kediktatoran militer, kesuksesan ini mengantarkan Thailand dipimpin oleh kelompok kepentingan dan politikus yang lebih bertanggung jawab kepada rakyat dan sejak saat itulah Thailand mengalami banyak transisi ke arah demokrasi meski pasang surut diikuti dengan upaya kudeta yang selalu menggertak perjuangan demokrasi (Neher, 1996, p. 308).

Krisis politik kembali terjadi di Thailand pada tahun 2006 ketika militer melakukan kudeta untuk menggulingkan PM Thaksin Shinawatra, hal ini memberikan dampak signifikan terkait situasi demokrasi di Thailand, kembalinya militer ke pentas perpolitikan Thailand memberikan sinyal buruk terhadap status demokrasi negara gajah putih ini. 2006 bukanlah akhir dari dominasi militer melainkan semakin kuat ketika 22 Mei 2014, Thailand dikuasai oleh *The National Council for Peace and Order (NCPO)* junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Prayuth yang berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya sekaligus merupakan kudeta ke-13 yang sukses sejak tahun 1932. Keterlibatan Junta militer secara langsung menjadikan Jenderal Prayuth Chan-ocha sebagai Perdana Menteri Thailand dan juga mempengaruhi mekanisme perpolitikan dan pemilihan umum yang ada di Thailand seperti memiliki kewenangan dalam memilih senat, ketersediaan kursi untuk militer, hingga pengaruh yang signifikan terhadap

lembaga penting lainnya yang justru semakin mengikis nilai-nilai demokrasi (Kongkirati, 2018, p. 363-365).

Keterlibatan Junta militer dan Prayuth yang semakin dominan dalam pemerintahan terlihat ketika 10 Oktober 2017, dengan tegas mengumumkan tanggal pemilihan umum di Thailand. Setidaknya telah dua kali junta ikut terlibat dalam menentukan tanggal pemilihan umum serta mengontrol jalannya pemilihan umum, seperti melakukan penundaan terhadap pemilihan umum dengan alasan keamanan dan mempertegas bahwa kembali ke demokrasi akan menimbulkan konflik yang terpolarisasi serta menimbulkan kekerasan. Selain itu, Prayuth dan junta secara terang-terangan mengungkapkan maksud politik mereka kepada publik akan keterlibatan militer dalam mempertahankan kekuasaannya dalam perpolitikan Thailand. Berdasarkan hal tersebut, di mana junta militer/NCPO memiliki kekuasaan serta keleluasaan dalam membuat partai dengan maksud untuk mendorong dan mempertahankan kekuasaan mereka dalam panggung perpolitikan Thailand, seperti menunjuk senat yang kemudian dapat mengangkat Perdana Menteri seperti Prayuth dan juga untuk memantau dan melindungi pemimpin yang terpilih dari militer agar tetap memimpin tanpa hambatan (Kongkirati, 2018, p. 365-367).

Melihat fakta bahwa Thailand merupakan negara demokrasi, berdasarkan konstitusi kerajaan Thailand tahun 2007 Bab 1 ayat 2 menyatakan bahwa Thailand mengadopsi rezim pemerintahan yang demokrasi dengan Raja sebagai kepala Negara (Constitution Drafting Commission, 2007). Akan tetapi, melihat tindakan yang dipertunjukan oleh junta militer semakin mencoreng nilai-nilai demokrasi di Thailand. Sejak kudeta 22 Mei 2014, Masyarakat Thailand di paksa hidup di

bawah bayang-bayang junta militer yang otoriter, di mana militer dengan leluasa menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan masyarakat serta menyalahgunakan kekuasaan negara untuk membungkam hak-hak masyarakat. Hal ini membuat masyarakat Thailand melakukan demonstrasi untuk menentang kediktatoran pemerintah, demonstrasi besar banyak berlangsung dari tahun 2010 ketika gerakan "Kaos Merah" atau T*he United Front for Democracy against Dictatorship* (UDD) yang aktif dalam menuntut pembubaran parlemen serta pemilihan umum baru (Buchanan, 2013, p. 61). Tidak hanya gerakan "Kaos Merah", pada tahun 2014 para demonstran yang merupakan masyarakat sipil seperti aktivis dan mahasiswa menyatakan penolakannya terhadap junta militer dengan mengangkat tiga jari yang digunakan dalam film *"The Hunger Games"* dan menempelkan lakban di mulut sebagai simbol penolakan. Pemimpin kudeta sekaligus Perdana Menteri Prayuth mengatakan bahwa tidak boleh ada yang mengkritik dan menghalangi pemerintahannya, serta banyak pelanggaran berkaitan dengan hak asasi manusia di Thailand (Human Rights Watch, 2014).

Krisis yang terjadi dalam perpolitikan Thailand yang tidak lepas dari dominasi dan pengaruh kuat militer sehingga terjadi kudeta di setiap kepemimpinannya membuat masyarakat Thailand selalu menuntut demokrasi yang tertuang dalam konstitusi Thailand serta menginginkan demokrasi yang nyata seperti pemenuhan hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun kebebasan (Rosema et al., 2011, p. 12). Demonstrasi ini terus berlanjut hingga 2020 sebanyak 10 ribu orang yang dipimpin para mahasiswa melakukan unjuk rasa untuk menuntut adanya reformasi dengan 10 tuntutan serta menginginkan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth, pembubaran parlemen

serta perubahan konstitusi. Masyarakat menginginkan demokrasi serta mengakhiri pemerintahan yang diktator (Mahtani, 2020). Namun, hingga saat ini belum ada respons yang diberikan pemerintah terkait gerakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus dalam menganalisis pengaruh *mahasiswa* terhadap upaya penegakan demokrasi di Thailand.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengaruh gerakan *mahasiswa* terhadap upaya penegakan demokrasi di Thailand pada masa pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha tahun 2014-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan faktor pendorong terjadinya gerakan *mahasiswa* dalam upaya menuntut pemerintahan Thailand pada masa pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha.
2. Mengetahui pengaruh *mahasiswa* dalam upaya penegakan demokrasi di Thailand pada masa pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha.
3. Mengetahui kondisi demokrasi di Thailand pada masa pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha.

1.4 Signifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat pengaruh *mahasiswa* dalam upaya penegakan demokrasi di Thailand pada masa PM Prayuth Chan-ocha. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih belum banyak yang menulis tentang topik ini. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang menulis mengenai demokrasi di Thailand, namun tidak membahas terkait pengaruh dari *mahasiswa.* Padahal *mahasiswa* memiliki andil yang penting dalam upaya

penegakan demokrasi di Thailand, khususnya pada masa pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha. Sehingga, terdapat beberapa poin penting terkait urgensinya penelitian ini.

Pertama, penelitian ini akan menjelaskan faktor pendorong masyarakat menuntut reformasi kepada pemerintah dan kerajaan di Thailand. Sebagai negara monarki konstitusional yang mengadopsi sistem demokrasi tentu saja menjadi tantangan pemerintahan Thailand dalam memenuhi hak-hak warganya. Disamping itu juga pemerintahan Thailand harus mempertahankan kepercayaan mereka terhadap sistem yang telah diwariskan secara turun temurun, di mana raja dipercaya sebagai Dewa atau Tuhan (Neher, 1996, p. 307). *Kedua*, meski kudeta merupakan hal yang biasa di Thailand, namun situasi di Thailand sejak kudeta 2014 sekaligus menjadi panggung politik yang memberikan jalan bagi militer untuk kembali mendominasi pemerintahan semakin diktator dan agresif dalam mengontrol masyarakat. Sehingga, penting adanya peran dari *mahasiswa* dalam merespon tindakan dari militer dengan tujuan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi yang selama ini dikebiri oleh pemerintah.

Ketiga, adanya pengaruh dari *mahasiswa* yang kemudian memberikan dampak pada kondisi demokrasi di Thailand saat ini. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan karena belum ada atau sedikitnya penelitian yang membahas bagaimana peran dari *mahasiswa* dalam upaya penegakan demokrasi di Thailand pada masa pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha. Pengaruh dari adanya *mahasiswa* ini sangat mendominasi dan berperan penting dalam kebijakan suatu pemerintahan bahkan berdampak pada dunia, keberadaan mereka tidak bisa diragukan dan dikesampingkan. Contohnya di Kroasia mereka berhasil menuntut

tanggung jawab pemerintah terkait HAM dan perlindungan lingkungan (Fioramonti & Heinrich, 2007, p. 34). Adapun tetangga Thailand yaitu Indonesia juga berhasil menunjukan pengaruh dari *mahasiswa* dalam upaya reformasi pada masa rezim Soeharto yang otoriter (Amal, 2013, p. 74-75). Oleh karena itu, kajian terkait *mahasiswa* ini selalu menjadi isu yang menarik dan penting untuk kita analisis.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan membahas terkait faktor-faktor pendorong yang menyebabkan masyarakat Thailand menuntut penegakan demokrasi di Thailand, serta pengaruh dari *mahasiswa* dalam upaya menegakkan demokrasi di Thailand pada masa pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha. Selain itu, alasan lain penulis mengangkat serta membatasi penelitian ini hanya pada masa pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha dikarenakan dominasi militer yaitu junta/NCPO yang sangat agresif dan diktator dalam mengontrol masyarakat Thailand sejak 2014 hingga saat ini. Disamping itu pula, terdapat hal menarik yang mana sering terjadi demonstrasi dan puncaknya pada tahun 2020 ketika demonstrasi yang dominan dipimpin oleh mahasiswa, aktivis, serta masyarakat sipil menuntut kerajaan bahkan secara terang-terangan mengkritik sistem kerajaan dan nilai demokrasi yang mulai pudar pada masa pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha (Sopranzetti, 2020).

Pada masa pemerintahan PM prayuth ini juga memberikan gelombang demonstrasi yang masif di Thailand seperti keterlibatan masyarakat sipil yang tidak hanya sebatas kaos merah dan kaos kuning, melainkan gerakan masyarakat sipil dari 2014-2020 di dominasi oleh mahasiswa, aktivis, dan masyarakat biasa,

pelanggaran-pelanggaran HAM dan matinya demokrasi. Sehingga, penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh *mahasiswa* dalam upaya penegakan demokrasi di Thailand pada masa pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha (2014-2020).

1.6 Tinjauan Pustaka

Polemik dan krisis politik yang terjadi di Thailand terkait demokrasi mengalami eskalasi konflik setiap tahunnya, terlebih pada tahun 2014 ketika jenderal Prayuth Chan-ocha beserta militer melakukan kudeta dan berhasil masuk serta mengontrol pemerintah. Krisis politik ini kian memanas hingga 2020 ketika rakyat secara serentak melakukan protes kepada kerajaan dan menuntut adanya reformasi. Sehingga, dalam tinjauan pustaka ini penulis mengambil beberapa artikel ataupun penelitian yang membahas mengenai krisis politik dan upaya penegakan demokrasi di Thailand. Salah satunya penelitian oleh Clark D. Neher yang berjudul *The Transition to Democracy in Thailand*, memaparkan proses demokratisasi di Thailand dalam masa periode kontemporer. Penelitian ini juga menjelaskan secara konkrit sejarah sistem pemerintahan serta transisi bentuk pemerintahan di Thailand dari yang sangat tersentralisasi pada masa Kerajaan Sukhothai (1238-1350) hingga menjadi Monarki Konstitusional pada tahun 1932. Thailand memiliki beberapa karakteristik struktur demokrasi Barat seperti adanya majelis nasional yang dipilih secara bebas dan representatif, lembaga eksekutif yang memiliki tanggung jawab terhadap rakyat, dan sistem multipartai. Namun, adanya dominasi militer dalam pemerintahan, kerajaan yang sangat otoriter, kesenjangan ekonomi antara desa dan perkotaan, korupsi yang merajalela, hingga partai politik yang lemah justru melemahkan peluang demokrasi di Thailand (Neher, 1996, p. 303-308).

Selain menjelaskan terkait permasalahan politik dan demokrasi di Thailand, Neher juga menyinggung mengenai langkah positif menuju demokratisasi yang sudah ada sejak lama di Thailand. Pemilu september 1992, melahirkan koalisi partai-partai yang secara lantang menentang dominasi militer dan mendukung pemerintahan sipil (Neher, 1996, p. 311-315). Selain adanya upaya dalam parlemen untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menghilangkan dominasi militer, terdapat juga gerakan sipil dari masyarakat terkait dominasi militer dan kudeta di Thailand seperti yang dijelaskan oleh Naruemon Thabchumpon dalam penelitiannya yang berjudul *Contending Political Networks: A Study of the "Yellow Shirts" and "Red Shirts" in Thailand's Politics*. Dia menjelaskan terkait dua kelompok gerakan sipil yang berpengaruh dalam perpolitikan di Thailand, yaitu PAD *(People's Alliance for Democracy)* atau dikenal dengan kaos kuning dan UDD *(The United Front for Democracy against Dictatorship)* atau dikenal dengan kaos merah. Thabchumpon juga memberikan gambaran bagaimana kedua gerakan sipil ini berbeda ideologi atau kepercayaan terkait demokrasi. Seperti kaos merah yang mewakili mayoritas elektoral, mendukung para pendukung adanya reformasi liberal yang menganggap demokrasi sebagai proses legalistik dan lembaga formal dalam politik. Disisi lain, kaos kuning merepresentasikan para elit politik profesional dan jaringan kekuasaan para teknokratik, yang menganggap pemilu tidak penting dan kelompok ini sering dikaitkan dengan militer dan monarki (Thabchumpon, 2016, p. 93-96).

Upaya penegakan demokrasi di Thailand tentu saja tidak dapat dipisahkan oleh adanya proses kudeta, dimana kudeta menyebabkan perjuangan demokrasi di

negeri gajah putih ini mengalami pasang surut terkait nasib demokrasi yang ada di sana. Michael Kelly Connors, dalam tulisannya yang berjudul *Democracy and National Identity in Thailand* bagian 3 menjelaskan bahwa eksistensi dominasi militer di Thailand pada tahun 1940-an akhir sangat menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan hingga tahun 1950-an, Thailand mengalami serangkaian kudeta, korupsi, dan impotensi parlemen. Kudeta dan pergantian kabinet secara terus-menerus mencerminkan rapuhnya demokrasi dan ketidakmampuan blok kekuatan yang bertahan lama (Connors, 2007, p. 44).

Berkaitan dengan kudeta, Thyne & Paul dalam penelitiannya *Coup d'état or Coup d'Autocracy? How Coups Impact Democratization, 1950–2008* menjelaskan terkait perbedaan kudeta dengan revolusi dan gerakan rakyat, mereka juga menjelaskan bahwa elemen penting yang mencirikan kudeta adalah kudeta harus dilakukan oleh elit yang merupakan bagian dari aparatur negara, umumnya adalah perwira militer. Disamping itu, kudeta juga memiliki karakter yang dapat membedakannya dari krisis politik sederhana, dimana adanya tekanan oleh oposisi mengakibatkan pengunduran diri pemerintah yang sedang berkuasa. Sehingga dapat didefinisikan bahwa kudeta merupakan upaya ilegal serta terbuka yang dilakukan oleh militer atau elit lain dalam aparatur negara dengan tujuan untuk menggulingkan eksekutif yang sedang menjabat (Thyne & Powell, 2014, p. 195-196). Kudeta yang terjadi di Thailand berlangsung secara berkala dan mewarnai beberapa periode kepemimpinan seperti Thaksin dan sepupunya Yingluck Shinawatra.

Pada 22 Mei 2014, Thailand jatuh dalam kekuasaan The National Council for Peace and Order (NCPO) junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Prayuth

yang berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya sekaligus merupakan kudeta ke-13 yang sukses sejak tahun 1932. Prajak Konkirati dalam penelitiannya *HAUNTED PAST, UNCERTAIN FUTURE: The Fragile Transition to Military-Guided Semi-Authoritarianism in Thailand* menjelaskan bagaimana Prayuth Chan-ocha membawa Thailand kembali ke pemerintahan otoriter militer dan mengembalikan model lama "demokrasi gaya Thailand", dimana aliansi kerajaan dan militer mendominasi perpolitikan di Thailand. Sejak kudeta tahun 2014, militer semakin memantapkan dirinya sebagai elit penguasa baru dengan memperluas ruang lingkup kekuasaannya, anggaran, serta ukurannya. Tidak hanya itu, militer juga berusaha untuk mempertahankan dominasinya dengan melemahkan demokrasi dan melemahkan pengaruh partai politik serta masyarakat sipil melalui adanya rancangan konstitusional. Dalam tulisannya, Konkirati juga menjelaskan upaya pemerintah Prayuth dalam merestrukturisasi tatanan politik yang ada di Thailand melalui berbagai mekanisme kelembagaan untuk investasi dan mempertahankan warisan kekuasaan militer (Kongkirati, 2018, p. 363-365).

Pernyataan mengenai situasi politik Thailand yang mengalami pergolakan politik dan demokrasi dalam negerinya juga dijelaskan oleh Prajak Kongkirati dan Veerayooth Kanchoochat dalam jurnalnya yang berjudul *The Prayuth Regime: Embedded Military and Hierarchical Capitalism in Thailand*, terutama ketika rezim Prayuth melakukan kudeta pada 2014, dan berhasil menjadi PM Thailand hingga sekarang. Dalam tulisannya mereka menjelaskan mengenai dominasi militer yaitu junta militer yang berupaya untuk memiliterisasi kabinet, parlemen, dan bahkan perusahaan milik negara. Rezim Prayuth juga meloloskan konstitusi yang dirancang untuk melembagakan kekuatan militer. Konstitusi 2017 disusun

oleh komisi yang dipimpin oleh Meechai Ruchupan dengan membentuk majelis nasional bikameral, yang terdiri dari dewan perwakilan rakyat terpilih (500) dan senat yang ditunjuk (250). Adapun, masa jabatan majelis rendah adalah empat tahun dengan senat selama lima tahun. *The National Council for Peace and Order (NCPO)* memiliki kewenangan untuk memilih sendiri senat yang beranggotakan 250 orang dalam lima tahun pertama. Hal ini menyebabkan adanya investasi kekuasaan yang sangat jelas dilakukan oleh Prayuth dan junta militer, sehingga potensi kudeta sangat kecil terhadap dominasi militer dan kepemimpinan yang otoriter (Kongkirati & Kanchoochat, 2018, p. 1-5).

Berdasarkan beberapa hasil temuan penulis di atas mengenai penelitian terkait pengaruh gerakan *mahasiswa* terhadap upaya demokrasi di Thailand pada masa PM Prayuth Chan-ocha, memang tidak ada yang secara eksplisit membahas bagaimana peran dari gerakan *mahasiswa* di Thailand dan upaya penegakannya selama rezim kepemimpinan Prayuth Chan-ocha. Meskipun peran dari *mahasiswa* sudah ada eksistensinya sejak lama dan bukan hal baru di Thailand. Hal ini dapat kita lihat dalam penelitian Neher yang membahas terkait sejarah sistem demokrasi di Thailand dan adanya upaya elit politik di Thailand dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Sedangkan, penelitian Thabchumpon menyinggung peran *mahasiswa* pada zaman Thaksin Shinawatra, adapun penelitian Connors, Thyne, Powell, dan Konkirati cenderung menjelaskan bagaimana kudeta mempengaruhi situasi politik di Thailand dan juga cenderung membahas terkait dominasi militer dalam pemerintahan, hal ini kemudian menyebabkan adanya pemerintahan yang represif dan otoriter di Thailand, khususnya pada masa PM Prayuth Chan-ocha.

Beberapa penelitian tersebut juga secara tidak langsung menganalisis dampak dari adanya kudeta dan dominasi militer dalam perpolitikan di Thailand. Begitu juga dengan penelitian Kongkirati & Kanchoochat yang lebih kepada menjelaskan dominasi militer melalui adanya konstitusi baru, yang kemudian memberikan peluang bagi militer untuk melakukan intervensi lebih dalam pemerintahan dan mengontrol masyarakat. Oleh karena itu, berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini akan spesifik menganalisis peran dari gerakan *mahasiswa* terhadap upaya penegakan demokrasi di Thailand pada masa kepemimpinan PM Prayuth Chan-ocha pada tahun 2014-2020.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep TAN (*Transnational Advocacy Networks/*Jaringan Advokasi Transnasional*)* dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pada penelitian ini. Jaringan dalam konteks TAN merupakan bentuk organisasi yang memiliki ciri khas pola komunikasi dan pertukaran sukarela, timbal balik, dan horizontal. Sejatinya, dinamika politik dunia sangat variatif dengan melibatkan banyak aktor, tidak hanya aktor negara melainkan juga aktor non-negara. Interaksi yang dilakukan oleh aktor non-negara tidak hanya sebatas interaksi dengan sesama aktor negara, melainkan juga interaksi dengan negara hingga organisasi internasional. Sehingga. TAN mencakup para aktor yang bekerja secara internasional dalam suatu isu, mereka memiliki ikatan yang kuat satu sama lain dengan nilai yang sama, wacana yang sama, hingga pertukaran informasi secara bersama. Oleh karena itu, TAN memiliki peran sebagai kelompok penekan

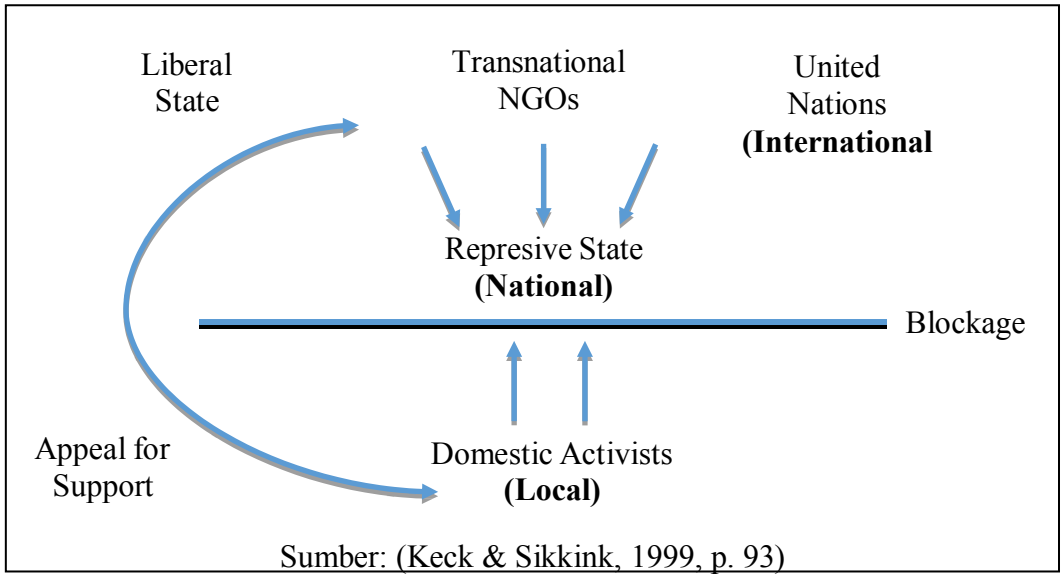
terhadap suatu isu atau kebijakan baik nasional maupun internasional yang tidak sesuai dengan tujuannya, dengan membangun hubungan baru *(new links)* di antara para aktor dalam masyarakat sipil, negara, dan organisasi internasional.

TAN membingkai isu-isu untuk dibuat lebih komprehensif kepada target sasaran/audiens, guna menarik perhatian mereka dan mendorong mereka untuk bergerak. Tujuan dari membingkai isu tersebut sebagai upaya strategis bagi sekelompok orang untuk memiliki pemahaman yang sama dan saling memotivasi satu sama lain. Jaringan advokasi ini hadir dengan membawa ide, norma, dan diskursus baru dalam pembahasan kebijakan. Mereka juga mempromosikan dan mendorong pengimplementasian norma dengan menekan target atau pelaku sasaran untuk mengadopsi kebijakan baru, dan juga memantau kepatuhan terhadap standar regional dan internasional. Jaringan dalam konteks TAN merupakan struktur yang komunikatif, sehingga untuk mempengaruhi diskursus, prosedur, dan kebijakan, TAN dapat menjadi bagian dari komunitas kebijakan yang besar yang menyatukan aktor dari berbagai posisi institusional dan nilai.

Jaringan advokasi juga dapat dipahami sebagai ruang berpolitik, dimana para aktor dengan keadaan atau situasi berbeda dapat melakukan negosiasi baik secara formal maupun informal terkait sosial, budaya, dan politik. Dua cara tersebut membuat TAN menjadi kendaraan utama bagi negosiasi budaya dan sosial yang dapat mendukung proses integrasi regional. Keck dan Sikkink mengelompokkan TAN kedalam tujuh aktor utama, yaitu LSM baik domestik maupun internasional, peneliti, dan organisasi advokasi; pergerakan sosial berskala lokal; yayasan; media; kelompok keagamaan, kelompok perdagangan, para peneliti; bagian dari organisasi regional dan antar pemerintah; bagian dari

badan eksekutif maupun parlemen di pemerintahan. Dalam tulisannya, Keck dan Sikkink melihat pemerintah merupakan aktor utama dalam membangun hubungan dengan akor lain terutama masyarakat. Ketika melihat hubungan antara pemerintah dan masyarakat mengalami kendala dengan adanya pembatasan atau bahkan penutupan akses antara masyarakat dan pemerintah, hal ini akan menyebabkan terciptanya pola hubungan yang dikenal dengan *"boomerang pattern"*. Pola *boomerang* ini terjadi ketika kelompok-kelompok lokal maupun individu memiliki klaim atas masalah tertentu, namun pemerintah tidak responsif terhadap mereka, sehingga mereka mencari koneksi internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Gambar 1. Boomerang Pattern (Three Level of Transnational Activism)



Sumber: (Keck & Sikkink, 1999, p. 93)

Dalam ilustrasi di atas, memperlihatkan bahwa peran aktor negara *(Liberal State)* dan aktor non-negara *(Transnational NGOs and United Nations)* dapat membantu dalam mendukung tujuan dari jaringan advokasi dan membantu untuk memberikan tekanan-tekanan kepada pemerintahan yang represif. Dalam lingkup domestik, terdapat aktivis domestik yang ketika dihadapkan dengan batasan atau

rintangan *(Blockage)* yang akan mempengaruhi agenda-agenda mereka terhadap pemerintah di negara yang mereka tinggali mereka dapat meminta bantuan dari aktor yang memiliki kekuatan lebih besar. Dalam bagan kita bisa melihat bagaimana aktor domestik (pergerakan sosial berskala lokal; yayasan; media; kelompok keagamaan, kelompok perdagangan, para peneliti; bagian dari organisasi regional; dan bagian dari badan eksekutif maupun parlemen di pemerintahan). ketika berhadapan dengan *blockage* dalam tingkat lokal, mereka bisa meminta bantuan/*appeal support* kepada LSM di luar dari negaranya, mereka bisa meminta dukungan dari LSM, organisasi internasional, hingga aliansi pergerakan dari negara lain dan kemudian mereka sebagai jaringan advokasi menggunakan strateginya untuk menekan negara yang represif.

Pola ini merupakan upaya strategi dari TAN guna mengubah perilaku negara. Konsep *boomerang pattern* ini memiliki empat cara, yaitu:

1. *Information Politics*, yaitu kemampuan dalam memobilisasi informasi politik dengan cepat dan juga kredibel. Di mana informasi ini berguna dalam menarik perhatian dan juga mengarahkan target dengan cara mengirimkan informasi ke tempat yang memiliki pengaruh kuat.
2. *Symbolic Politics*, merupakan kemampuan untuk menyampaikan sesuatu melalui dan menggunakan simbol (simbolik), melalui tindakan atau pemaparan mengenai situasi atau kondisi yang sedang terjadi. Cara kedua ini dapat menarik perhatian masyarakat baik dalam dan luar yang memiliki jarak jauh.
3. *Leverage Politics*, yaitu kemampuan dalam menarik aktor-aktor dengan kekuatan lebih kuat guna mempengaruhi situasi maupun kondisi tertentu,

dimana anggota yang lemah dalam jaringan ini tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi situasi tertentu.

4. *Accountability Politics*, merupakan upaya dalam mendorong aktor-aktor yang memiliki kemampuan lebih kuat untuk melakukan tindakan sesuai dengan kebijakan serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep TAN dalam menganalisis pengaruh gerakan *mahasiswa* terhadap upaya penegakan demokrasi di Thailand, khususnya pada masa PM Prayuth Chan-ocha. Konsep ini akan digunakan dalam melihat bagaimana peran dari *mahasiswa* dan faktor pendorong terjadinya gerakan *mahasiswa* dalam upaya menuntut pemerintahan Thailand dan penegakan demokrasi di Thailand. Penelitian ini juga akan melihat gerakan *mahasiswa* di Thailand dalam konsep *boomerang pattern*. Melalui konsep ini kita akan melihat bagaimana gerakan *mahasiswa* di bingkai dalam bentuk informasi dan juga simbolik dalam upaya penegakan demokrasi di Thailand. Selain itu, kita juga dapat melihat kemampuan aktor *mahasiswa* dalam menarik perhatian aktor-aktor yang lebih kuat dengan pengaruh yang besar, serta bagaimana kemudian upaya ini membawakan hasil baik positif maupun negatif.

Sejatinya, gerakan *mahasiswa* bukanlah hal baru di Thailand, dan seiring bergantinya kepemimpinan menjadi lebih otoriter serta didominasi oleh militer, tentu saja peran dari *mahasiswa* semakin mengalami ekspansi dalam menuntut adanya kebebasan sebagai negara demokrasi. Tentu saja gerakan *mahasiswa* di Thailand mengalami banyak perubahan dan implikasinya terhadap negara juga semakin konkrit. Disisi lain, terdapat hal yang dapat memperkuat alasan bahwa konsep TAN dapat digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah. Dimana dapat

dilihat gerakan masyarakat sipil di Thailand dengan bentuk pemerintahan yang Monarki, namun mengadopsi sistem pemerintahan yang demokrasi, tentu saja menjadi tantangan bagi masyarakat sipil di Thailand, sekaligus upaya masyarakat dalam mengubah perilaku negara melalui konsep *boomerang pattern*.

Konsep TAN merupakan konsep yang tepat untuk menganalisis penelitian ini dikarenakan dalam upaya penegakan demokrasi di Thailand, khususnya pada masa pemerintahan PM Prayuth, keterlibatan *mahasiswa* sangat dominan dalam memaksa negara untuk menegakkan keadilan dan perdamaian, bahkan dapat menciptakan perubahan. Sebagaimana yang telah ditulis oleh Keck dan Sikkink, kita akan melihat bagaimana TAN dapat muncul, bekerja, hingga dalam kondisi seperti apa TAN ini dapat berpengaruh

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan serta menganalisis suatu persepsi, pemikiran seseorang secara individu maupun kelompok. Melalui beberapa deskripsi yang kemudian digunakan dengan tujuan untuk menemukan penjelasan yang akan mengarahkan pada kesimpulan.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini ialah negara sebagai aktor utama yakni Thailand, dan juga aktor yang bersengketa di Thailand, yaitu pemerintah PM Prayuth Chab-ocha dan gerakan *mahasiswa.* Selain itu Negara dan pemerintah PM Prayuth Chan-ocha merupakan pihak yang terlibat dalam serangkaian kudeta. Akan tetapi karena penelitian ini memfokuskan pada upaya gerakan *mahasiswa* di Thailand

dalam upaya penegakan demokrasi di Thailand, maka subjek penelitian ini akan difokuskan pada *mahasiswa*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data didefinisikan sebagai sebuah proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Dalam melakukan penelitian terkait upaya gerakan *mahasiswa* terhadap upaya penegakan demokrasi di Thailand, metode yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur. Melalui metode ini, data-data dalam penelitian didapatkan melalui literatur-literatur berupa buku-buku, buletin daring, serta sumber artikel dan internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun sumber data yang digunakan adalah melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa tulisan-tulisan akademik serta buku rujukan yang terkait dengan penelitian ini dan sumber-sumber dari media internasional, maupun *website* milik pemerintah.

1.8.4 Proses Pengumpulan Data

Proses penelitian merupakan metode lanjutan untuk melakukan analisis data dari data yang didapat. Setelah mendapatkan data dari berbagai literatur, tahap selanjutnya adalah kajian ulang atau pendalaman data maupun materi yang telah diperoleh, dengan cara membaca substansi dari masing-masing sumber agar mendapatkan substansi atau gagasan yang tepat. Setelah itu tahap berikutnya adalah pencatatan hasil kajian dan literatur agar substansi yang diperoleh tersebut dapat disimpan.

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pendataan dan pembagian materi-materi kajian berdasarkan pada catatan dan membagikannya menjadi beberapa

sub-bab, yang kemudian akan menjadi bagian dari substansi pembahasan terkait penelitian. Selanjutnya adalah melakukan penjabaran secara deskripsi dari hasil pembagian sub-bab terkait. Langkah terakhir adalah pemaparan kesimpulan penelitian yang didapat melalui hasil pemikiran dan interpretasi dari kajian yang diperoleh.

BAB II

PERAN GERAKAN MAHASISWA DALAM MERESPON PERMASALAHAN DEMOKRASI DI THAILAND

2.1 Junta Militer sebagai Aktor Utama Eskalasi Konflik

Keterlibatan militer dalam sistem pemerintahan di Thailand merupakan salah satu alasan terjadinya eskalasi konflik di Thailand. Perdana menteri dan tonggak kabinet utama merupakan jabatan tertinggi pemerintahan di Thailand yang didominasi oleh perwira militer. Hal ini merupakan situasi normal pasca kudeta, di mana kepala pemerintahan (perdana menteri, kepala dewan revolusioner, hingga presiden) serta menteri-menteri yang memegang jabatan inti seperti menteri pertahanan dan menteri dalam negeri) menjadi perwira militer. Siklus seperti ini telah terjadi di Thailand kurang lebih 90 tahun sejak runtuhnya monarki absolut pada tahun 1932. Hal ini membuat dominasi militer dalam kursi pemerintahan termasuk posisi perdana menteri (Mehden, 1970, p. 324-325).

Adanya keterlibatan militer dalam sistem pemerintahan Thailand ini juga memberikan gejolak politik bagi pemerintah dan masyarakat sipil. Hal ini ditandai dengan adanya konflik politik antara dua kelompok berbeda yaitu pro-demokrasi dan anti-demokrasi. Konflik ini bermula ketika proses demokratisasi politik berlangsung yang dimulai pada tahun 1990-an. Salah satu faktor terjadinya konflik politik di Thailand yaitu diadopsinya konstitusi 1997, yang menjadi cikal bakal demokrasi di Thailand. Konstitusi ini secara drastis mengubah sistem pemilu dan juga memberikan pengaruh mendalam pada sistem politik di Thailand. Pada saat itu, pemimpin politik Thailand yaitu Thaksin Shinawatra, memanfaatkan konstitusi baru ini sebagai alat politiknya dalam mengubah

kesadaran dan sikap politik masyarakat Thailand. Banyak masyarakat berpikir bahwa demokrasi lah yang tepat untuk menjadi satu-satunya sistem politik di Thailand (Tsunekawa & Todo, 2018, p. 271).

Konstitusi 1997 dengan tujuan sebagai "konstitusi rakyat", berusaha untuk menata sistem perpolitikan di Thailand dengan mengintegrasikan sistem *check and balance* yang kuat, memperkuat partai politik, serta menjunjung tinggi hak-hak politik, sosial, dan ekonomi. Konstitusi ini juga memayungi beberapa elemen penting dalam perpolitikan di Thailand, seperti senat yang dipilih secara penuh, adanya sistem daftar partai, serta pembentukan beberapa badan pengawas independen. Sayangnya, dengan banyaknya terobosan dibawah kepemimpinan Thaksin, membuat beberapa hal justru menjadi lebih buruk. Hal ini dikarenakan Thailand menganut sistem monarki konstitusi dimana raja sebagai kepala negaranya. Beberapa hal seperti supremasi hukum, hak-hak sipil, kebebasan masyarakat seperti kebebasan berekspresi, serta sistem *check and balance* mendapatkan pukulan yang sangat keras karena tidak sejalan dengan sistem kerajaan. Meskipun, dibawah kepemimpinan Thaksin, masyarakat miskin pedesaan merasa terwakilkan dan diberikan haknya (Kuhonta, 2008, p. 374).

Gejolak politik di bawah kepemimpinan Thaksin juga ditandai dengan ketidakpuasan serta sentimen dari beberapa kalangan yang tidak senang dengan demokratisasi. Di antaranya yaitu minoritas tokoh yang berpengaruh dalam politik, masyarakat kelas atas, dan juga masyarakat menengah di perkotaan. Politik elektoral baru ini melumpuhkan kekuatan dan pengaruh politik mereka, dimana sebelumnya mereka telah menikmati hak istimewa di bawah pemerintahan yang otoriter. Pihak lainnya yang merasa tidak senang dengan demokratisasi

adalah monarki dan pendukungnya, termasuk Raja Bhumibol Adulyadej yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun otoritasnya, yang kemudian dirusak oleh demokratisasi. Pihak yang tidak puas inilah yang akhirnya memulai upaya de-demokratisasi pada tahun 2005 dan dilanjutkan dengan melakukan kudeta untuk menggulingkan pemerintah terpilih tahun 2006, 2008, dan 2014. Jika diakumulasikan, terdapat dua belas kudeta militer yang sukses di Thailand sejak tahun 1932, yaitu pada tahun 1932,1933,1947, 1951, 1957, 1958, 1971, 1977, 1991, 2006, dan 2014 (Tsunekawa & Todo, 2018, p. 272).

Kudeta yang terjadi di Thailand tidak selamanya dilatarbelakangi oleh kepentingan militer saja, melainkan juga kepentingan monarki. Dua diantara kudeta yang terjadi di Thailand, yaitu pada tahun 2006 dan 2014 diprakarsai oleh kaum royalis kerajaan, sehingga dapat dikatakan kudeta yang terjadi merupakan kudeta kerajaan (Chairat 2009, hal. 51). Salah satu persaingan sengit antara pemerintah dan militer dalam merebut kekuasaan politik di Thailand yaitu ketika Partai Kekuatan Rakyat /*People's Power Party* (PPP) memenangkan Thaksin pada pemilihan umum 2007, dan setelahnya kelompok penekan yaitu Aliansi Rakyat untuk Demokrasi/*People's Alliance for Democracy* (PAD) berusaha untuk menggulingkan pemerintahan. PAD menyadari bahwa pemerintah tidak bisa dijatuhkan dengan pemilu, akhirnya mereka melakukan kudeta militer. 2 Desember 2008, ketikan Mahkamah Konstitusi membubarkan PPP, beberapa pemimpin tentara menekan anggota parlemen pemerintah untuk berpihak dan segera membentuk pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Partai Demokrat/*Democratic Party* (Tsunekawa & Todo, 2018, p. 279).

Pemerintahan di bawah DP adalah pemerintahan oleh, dari, dan untuk militer. Tentu saja Partai Demokrat mendapat perlawanan terkait kediktatorannya yang disuarakan oleh Front Persatuan untuk Demokrasi melawan Kediktatoran/*the United Front for Democracy against Dictatorship* (UDD), mereka mengadakan rapat politik yang berskala besar pada tahun 2009 dan 2010 di Bangkok, dimana mereka menyuarakan agar pemilihan umum dilaksanakan lebih awal. Seruan ini mendapat respon tidak menyenangkan dari militer, di mana militer menindas mereka dengan kekerasan. Pada 2011, pemerintahan DP berhasil mengubah sistem pemilihan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sayang sekali, partai pro-Thaksin kembali memenangkan pemilu sekaligus menjadikan adik perempuan dari Thaksin, yaitu Yingluck Shinawatra sebagai perdana menteri (Tsunekawa & Todo, 2018, p. 280).

Melihat posisi perdana menteri yang dipimpin oleh Yingluck Shinawatra, Junta yang dipimpin oleh Jenderal Prayuth kembali melakukan kudeta pada 22 Mei 2014. Kudeta ini juga didukung oleh PAD dan para pendukung DP, mereka berasal dari kalangan kelas atas dan kelas menengah. Setelah memenangkan kudeta, Jenderal Prayut langsung menjalankan pemerintahannya dan secara militan membubarkan banyak organisasi pro-Thaksin. Di bawah kekuasaan Junta Militer/*National Council for Peace and Order* (NCPO), PM Prayuth Chan-o-cha menghasilkan aturan absolut Junta yang tertuang dalam dua konstitusi yaitu 2014 dan 2017, serta NCPO juga membungkam hak-hak politik dan kebebasan sipil. Tidak hanya itu, kelompok oposisi seperti Gerakan Demokrasi Baru/*New Democracy Movement* telah ditindas dan para anggotanya diintimidasi hingga dipenjara. Pada April 2017, badan-badan institusional yang dibentuk oleh Junta

dan raja baru Thailand yaitu Maha Vajiralongkorn berhasil meneguhkan konstitusi ke-20 Thailand yang dinilai konservatif. Dimana militer secara tidak langsung mengontrol Senat yang dipilih, sistem pemilihan yang menangkal partai politik untuk memperoleh mayoritas kursi di Majelis Rendah, serta kesempatan bagi militer untuk menjabat sebagai perdana menteri (Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI), 2020).

2.2 Munculnya Kelompok Baju Kuning dan Baju Merah sebagai Bentuk Perlawanan

Sejatinya gerakan *civil society* di Thailand telah muncul dan berkembang sejak 1990-an, ketika terdapat dua kelompok yang pro-reformasi demokrasi dan kontra demokrasi. Namun, pergerakan *civil society* semakin memanas ketika muncul dua kelompok besar dalam politik Thailand, yaitu kelompok *yellow shirt*/baju kuning dan kelompok *red shirt*/baju merah. Kedua kelompok ini memiliki sejarah yang panjang serta latar belakang yang berbeda. Perbedaan kedua kelompok ini berkaitan dengan interpretasi politik demokrasi di Thailand yang kemudian membuat adanya polarisasi di antara elemen masyarakat sipil. Perbedaan ini terlihat dalam berbagai argumentasi, wacana politik, hingga pemahaman terkait legitimasi demokrasi. Kelompok baju kuning juga dikenal sebagai Aliansi Rakyat untuk *Demokrasi/People's Alliance for Democracy* (PAD) dan kelompok baju merah yaitu Front Persatuan untuk Demokrasi melawan Kediktatoran*/the United Front for Democracy against Dictatorship* (UDD) (Thabchumpon, 2016, p. 95-97).

Kelompok baju kuning/PAD terdiri dari elemen masyarakat sipil elit perkotaan yang beraliansi dengan militer, para birokrat, aktivis kelas menengah,

pengusaha, akademisi konservatif, hingga keluarga kerajaan. Kelompok ini juga dikenal dengan sebutan gerakan "pendukung raja". Beberapa bentuk pergerakan kelompok ini yaitu pada tahun 2006, mereka melakukan demonstrasi untuk memaksa pengunduran diri Thaksin setelah upaya mereka dalam menyelidiki dugaan korupsi gagal. Demonstrasi yang dilakukan oleh PAD menjadi pintu pembuka bagi kudeta militer 2006 sekaligus menjadi pertanda awal kehancuran demokrasi di Thailand. Peristiwa tahun 2006 menjadi salah satu bukti kesiapan para elite pendukung raja tradisional dan juga pendukungnya yaitu masyarakat sipil kelas menengah ketika mereka tidak menghormati "keputusan mayoritas hasil pemilihan umum" hingga mencopot paksa seorang pemimpin yang terpilih (Lorch, 2020, p. 87).

Adapun kelompok baju merah/UDD merupakan kelompok yang dibentuk sebagai anti-PAD atau baju kuning setelah kudeta tahun 2006. Kubu Thaksin ini terdiri dari elit partai politik TRT Pheu Thai. Kelompok ini juga terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil, seperti intelektual publik, artis, hingga mantan pemimpin gerakan pro-demokrasi 1992. Kelompok pro-Thaksin ini semakin dikebiri haknya dan sering kali menjadi incaran militer ketika kudeta tahun 2014 sukses. Jenderal Prayuth Chan-o-cha menindas partai pendukung kelompok baju merah, yaitu Pheu Thai dan mengatur konstitusi baru untuk memperkuat dominasi politiknya. Sejak kudeta 2014, Junta Militer atau NCPO memimpin Thailand dan menjadi salah satu alasan peran politik UDD menurun secara drastis, mereka ditindas hingga menimbulkan perpecahan dalam kelompok. Hal ini juga berpengaruh pada situasi politik dari tahun 2014-2015 di mana demokrasi

Thailand dan juga kelompok politik yang aktif dalam menyuarakan demokrasi melemah (Lorch, 2020, 88).

Melalui Junta Militer, UDD mendapatkan banyak ancaman serta perlakukan koersif dengan tujuan menghalangi mereka untuk melakukan pertemuan politik, salah satunya dengan menggunakan pasal 44 konstitusi sementara 2014 yang memperbolehkan militer dan polisi untuk melakukan penyelidikan, penahanan, atau pengekangan lainnya terhadap hak-hak siapa pun yang dicurigai (Thabchumpon, 2016, p. 109). Gejolak politik yang memisahkan masyarakat Thailand ke dalam dua kelompok yaitu baju merah (pro-Thaksin, pro-demokrasi, dan para akademisi) dan baju kuning (ultra-royalis, teknokrat, dan juga kelas menengah di Bangkok) akhirnya mendorong aktifnya pergerakan *civil society* baik dari kubu baju kuning maupun baju merah. Bahkan Junta Militer secara terang-terangan mengatakan bahwa keberadaan kelompok baju merah dan pendukung demokrasi menjadi ancaman bagi bangsa Thailand.

Beberapa bentuk perlawanan dari kedua kelompok ini yaitu: pertama, ketika baju merah melakukan aksi protes tahun 2009-2010 dengan agenda untuk menuntut pengunduran diri pemerintah yang didukung oleh kelompok baju kuning. Demonstrasi menyebabkan kedua kelompok saling adu hinaan dan militer membantu pemerintah dengan memukul mundur para pengunjuk rasa yang mengakibatkan lebih dari 90 orang meninggal dan 2.000 mengalami. Luka-luka. Kedua, aksi demonstrasi baju kuning yang turun ke jalan untuk memprotes pemerintahan yang pada saat itu dimenangkan oleh kelompok baju merah, pada tahun 2013-2014 mereka melakukan demonstrasi terkait skandal korupsi yang berujung dengan serangkaian serangan bersenjata terhadap para demonstran.

Dalam rentang 29 Januari-11 Mei 2014, dilaporkan bahwa terjadi 32 serangan bom di sekitar tempat protes yang berujung pada 25 orang tewas dan 800 orang mengalami luka-luka. Situasi ini akhirnya membuat Jenderal Prayuth Chan-o-cha yang pada saat itu menjabat sebagai panglima militer mengumumkan darurat militer dan merebut kekuasaan (Sombatpoonsiri, 2018, p. 92-93).

2.3 Keterlibatan Mahasiswa, Media, hingga NGO/Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Upaya Penegakan Demokrasi di Thailand

Dalam merespons Junta Militer, terdapat dua kelompok yang aktif dalam mengkritik Junta, yaitu: 1) Politisi dan pendukung baju merah; 2) Mahasiswa, akademisi, jurnalis, dan warga negara lainnya yang pro-demokrasi. Meskipun kelompok baju merah menjadi ancaman serius bagi eksistensi Junta, karena mereka mampu melakukan kudeta balasan untuk menggulingkan kepemimpinan Junta. Terdapat pula agen perlawanan baru yang patut ditakuti Junta, yaitu mahasiswa. Junta sendiri mengakui mereka kewalahan dalam mengontrol protes yang dilakukan secara simbolis oleh individu-individu yang memiliki sikap demokratis serta menentang otoritas Junta. Ini menyebabkan Junta mengeluarkan wacana "keamanan" sebagai bentuk respon kepada aksi protes simbolis. Mereka juga mendelegitimasi kelompok penentang secara publik.

Mahasiswa menjadi salah satu yang paling vokal dalam melakukan aksi protes simbolis. Salah satu tindakan yang terkenal pada saat itu adalah dengan memakan *sandwich*. Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Thammasat, karena polisi melarang dan menetapkan darurat militer sehingga mereka para protester tidak bisa membagikan selebaran, akhirnya mereka menemukan cara lain yaitu dengan membagikan *sandwich*. Hal yang sama juga dilakukan oleh

mahasiswa Universitas Kasetsart dengan mengadakan *"sandwich party"*. Selain itu, terdapat juga protes simbolis lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil yaitu penggunaan salut tiga jari yang terinspirasi dari film *The Hunger Games*. Setelah mahasiswa mengadopsi simbol tersebut, mereka juga menggunakan momentum season dua dari film *The Hunger Games* ketika tayang di Thailand. Para siswa berinisiatif membagikan tiket secara gratis di bioskop di pusat kota Bangkok. Meskipun pihak bioskop menolak siswa masuk ke dalam bioskop (BBC, 2014).

Selain aksi makan *sandwich* dan juga penggunaan salut tiga jari, mahasiswa juga menggunakan seni sebagai media mereka dalam melakukan aksi protes. Sebagai contoh ketika seorang sejarawan pro-demokrasi Universitas Thammasat dipaksa untuk mengundurkan diri, terdapat delapan mahasiswa yang membagikan puisi karya Chit Phumisak, penyair Thailand sekaligus pemberontak komunis. Pada kesempatan lainnya, mereka juga membentuk koalisi bersama pengacara hak asasi manusia, seniman, dan penulis, yang dikenal dengan *"Citizen Resistant"*. Ketika Valentine, mereka juga menggelar pertunjukan di jalan yang bertajuk *"My Dear/Stolen Election"*. Aksi ini menunjukkan seorang penampil membawa kotak suara sambil menari, namun sama halnya dengan kasus-kasus sebelumnya, seorang polisi datang dan mengambil kotak tersebut. Banyaknyaaksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa menuai banyak kekhawatiran karena menjadi salah satu ancaman bagi eksistensi politik Junta di Thailand. Hal ini membuat Junta menggunakan cara apapun untuk menyingkirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan demokrasi (Sombatpoonsiri, 2018, p.94-95).

Oleh karena itu, mahasiswa tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dari media dan juga lembaga swadaya masyarakat/*non-governmental organization* (NGO). Salah satu media yang memberikan dorongan besar dalam melakukan dan menyebarluaskan aksi demonstrasi adalah media sosial, yaitu melalui Twitter dan Facebook. Tagar *#FreeYouth* menjadi bukti bagaimana media sosial memberikan efek yang sangat besar bagi pergerakan *mahasiswa* di Thailand. Ketika Tattep Ruangprapaikitseree (Ford) dan Panumas Singprom (James) membuat tagar tersebut pada tahun 2019 serta membuat grup di Facebook *"Free Youth"*. Grup ini menjadi gerakan protes anti-pemerintah terbesar dalam sejarah kontemporer Thailand. Mereka awalnya tidak mengira grup ini akan menjadi besar, karena mereka membuat grup ini untuk memfasilitasi anak muda dalam berdiskusi secara bebas terkait masa depan negara. Aksi politik pertama mereka di media sosial yaitu survei pendapat terkait penghapusan wajib militer, yang secara menakjubkan mampu mengumpulkan hampir 26.000 suara (Sinpeng, 2021, p. 2).

Gerakan Pemuda Merdeka/*Free Youth Movement* (FYM) tidak hanya melakukan jajak pendapat saja melainkan juga merilis tiga tuntutan pada Juli 2020, yang berisi: pemilihan baru, konstitusi baru yang akan melayani rakyat, dan menghentikan aksi pemerintah terhadap rakyat yang menggunakan hak demokrasinya. Selain FYM, kelompok lain yaitu Front Persatuan Thammasat dan Demonstrasi/*United Front of Thammasat and Demonstration* (UFTD) juga membantu memfasilitasi protester anti-pemerintah berskala besar dengan menarik ratusan ribu orang di seluruh penjuru Thailand antara bulan Juli dan Desember 2020. Tagar (#เยาวชน ปลดแอก/*#FreeYouth*) menjadi tagar paling populer di Thailand dan berhasil menarik banyak perhatian masyarakat baik di Thailand

maupun masyarakat global. Tagar ini juga menjadi batu loncatan bagi pergerakan lainnya yang pro-demokrasi seperti Chiang Rai bebas, Biksu bebas, dan sebagainya. (Sinpeng, 2021, p. 3).

Melalui media sosial Twitter inilah mahasiswa dapat dengan bebas untuk bertukar pendapat dan mengkritik pemerintahan. Tercatat dalam sejarah bahwa aksi menaikkan tagar di Twitter berhasil menjadi kendaraan politik mahasiswa untuk mengkritik kerajaan dan militer. Hasil nyata dari pergerakan ini adalah kepemimpinan dan partisipasi siswa menengah dan mahasiswa dalam proses politik naik drastis dengan ratusan ribu peserta dan juga aksi protes yang hampir terjadi setiap hari, sekolah-sekolah di seluruh penjuru negeri menjadi tempat mereka melakukan protes seperti aksi salut tiga jari di *Hunger Games* saat lagu kebangsaan diputar di pagi hari. Selain itu, terdapat tuntutan bersejarah dari mahasiswa seperti mereformasi monarki, yang sebelumnya tidak pernah disuarakan sejak pemberontakan mahasiswa tahun 1976. Tentu saja semua usaha mahasiswa ini merupakan peran dari pemanfaatan media sosial seperti Twitter, sehingga mereka bebas berkampanye dan melakukan protes anti-pemerintah secara bebas dan luas (Sinpeng, 2021, p. 5).

Selain mahasiswa dan media sosial, LSM juga memberikan peran yang cukup penting bagi pergerakan *mahasiswa* di Thailand. Setelah Junta Militer dan Jenderal Prayuth Chan-o-cha menguasai pemerintahan Thailand, serta beberapa tindakan kekerasan terjadi terhadap masyarakat sipil, beberapa LSM pro-demokrasi mengeluarkan pernyataan dalam mendukung aksi masyarakat. Beberapa LSM internasional seperti *Amnesty International, Asia Democracy Network, Civil Right Defenders, Fortify Rights, Human Right Watch*, dan masih

banyak lagi mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh militer dan polisi Thailand. Mereka protes akan kekerasan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap para pengunjuk rasa. Mereka sangat menyayangkan ketika polisi memasang penghalang dan juga kawat berduri untuk mencegah masyarakat pro-demokrasi ketika melakukan demonstrasi damai. Polisi juga menembaki meriam air berwarna ungu dan bahan kimia gas air mata ke para pengunjuk rasa, padahal banyak mahasiswa hingga anak-anak yang mengikuti demonstrasi damai tersebut. Polisi juga gagal dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan baik dari kelompok baju merah ataupun kuning, hingga menimbulkan setidaknya 55 pengunjuk rasa terluka termasuk anak TK dan siswa sekolah dasar (Beck, 2020).

2.4 Tujuan dari Gerakan *Mahasiswa*

Demonstrasi yang terjadi di Thailand dari masa ke masa memiliki pola yang sama, yaitu mereka menyuarakan tentang kediktatoran militer serta hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah seperti korupsi, militer, dan sebagainya. Unjuk rasa terkait politik bukanlah hal yang baru di Thailand, perpecahan kelompok antara kelompok baju merah yang mendukung perdana menteri Thaksin dan juga mendukung masyarakat dalam proses demokrasi atau kelompok baju kuning yang merupakan oposisi. Ketika kudeta yang terjadi di tahun 2014, yang membuat Jenderal Prayuth Chan-o-cha merebut kekuasaan dalam pemerintahan, banyak masyarakat termasuk mahasiswa melakukan unjuk rasa. Mahasiswa memimpin protes pro-demokrasi dengan tuntutan untuk mencopot jabatan Jenderal Prayuth yang pada saat itu menjabat sebagai perdana menteri, mereka juga menuntut adanya konstitusi baru, dan batasan bagi monarki. Berbagai upaya proposal telah diajukan ke parlemen Thailand untuk mengamandemen konstitusi, namun

proposal tersebut ditunda oleh faksi royalis dan juga militer yang telah mendominasi senat (South China Morning Post, 2020).

Bentuk unjuk rasa yang terjadi pada masa pemerintahan Jenderal Prayuth Chan-o-cha, sebagian besar dipimpin oleh mahasiswa dan siswa sekolah menengah, yaitu pada masa pandemi COVID-19 yang berlangsung selama tiga bulan dan dikenal sebagai *"Free Youth Movement"*. Demonstrasi dilakukan di beberapa sekolah dan universitas di seluruh penjuru Thailand, guna menuntut konstitusi baru, pembubaran parlemen, dan mengakhiri pelecehan terhadap kritik dan oposisi pemerintah. Tidak hanya itu, para mahasiswa juga berkumpul di gedung-gedung pemerintahan termasuk markas besar militer, untuk menuntut adanya reformasi militer. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk perlawanan kepada militer yang mendominasi pemerintahan dan merebut kekuasaan dengan melakukan kudeta tahun 2014 (South China Morning Post, 2020). Tuntutan lainnya juga disuarakan oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Thammasat yaitu Panusaya. Sithijirawattanakul (Rung) bersama dengan mahasiswa lainnya yang melakukan unjuk rasa. Dia mengajukan 10 tuntutan, termasuk meminta agar anggaran kerajaan dikurangi dan meminta agar raja tidak ikut campur dalam perpolitikan (Ratcliffe, 2021).

2.5 Dampak dari Pergerakan *Mahasiswa*

Demonstrasi memuncak pada 2020, ketika demonstrasi dipimpin oleh pemuda yang berhasil menarik kurang lebih 100.000 massa dengan tuntutan yang menargetkan kerajaan. Dampak dari adanya demonstrasi ini juga dirasakan oleh beberapa negara tetangga, seperti menginspirasi perjuangan pro-demokrasi di Laos, Filipina, Indonesia, dan Myanmar. Di mana, tujuan dari protes-protes ini

adalah menanggapi ancaman dari rezim terhadap masyarakat sipil. Selain itu, dampak lainnya adalah hadirnya inovasi dalam melakukan demonstrasi. Para pengunjuk rasa menggunakan sosial media seperti Twitter dalam merespon efek resepsi, seperti membuat tagar *#SaveRung, #SavePenguin, #FreeYouth,* dan sebagainya. Selain itu, melalui sosial media juga mereka menggerakkan para pengunjuk rasa untuk menyuarakan hak mereka (Sombatpoonsiri, 2021).

Melalui demonstrasi di Thailand, beberapa aliansi pro-demokrasi akar rumput bermunculan di Asia Tenggara dan Asia. Misalnya penggunaan tagar seperti *#WhatsHappenungInThailand*, memicu beberapa negara untuk menaikkan tagar serupa, seperti di Laos ada *#IfLaosPoliticsWasGood*. Di Filipina, para pengunjuk rasa juga terinspirasi oleh Thailand untuk menentang undang-undang anti teror, dengan fokus kepada penganiayaan Reina Mae Asis Nasino. Bergeser ke bawah, ada Indonesia yang juga menolak adanya Omnibus Law di Indonesia. Beberapa negara di Asia Tenggara ini mengikuti protes damai ala Thailand. Negara di Asia seperti Hongkong dan Taiwan juga mendukung aksi Thailand dengan tagar *#MilkTeaAlliance*, yang membuat pergerakan massa di Thailand menjadi besar dan memberikan tekanan kepada pemerintah, seperti keinginan untuk menurunkan Jenderal Prayuth Chan-o-cha dari jabatannya serta tuntutan-tuntutan yang dilayangkan kepada kerajaan (Sombatpoonsiri, 2021).

BAB III

ANALISIS TEORI *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK* TERHADAP UPAYA PENEGAKAN DEMOKRASI DI THAILAND

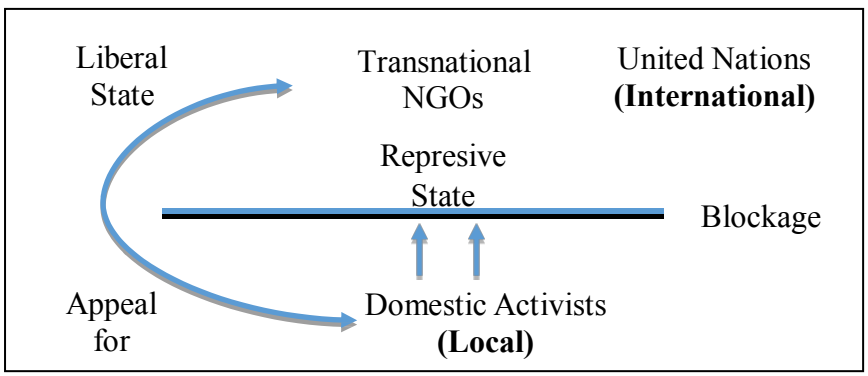
Pada bab tiga ini, penulis akan memaparkan analisis mengenai upaya penegakan demokrasi di Thailand yang dilakukan oleh *mahasiswa* pada masa PM Prayuth Chan-o-cha tahun 2014-2020 dengan menggunakan teori TAN oleh Keck dan Sikkink. Bab sebelumnya telah menjelaskan bagaimana situasi konflik di Thailand yang melibatkan pemerintah, militer, masyarakat sipil, hingga LSM. Telah dipaparkan juga terkait aktor yang terlibat serta tujuan dan dampak dari pergerakan yang mereka lakukan. Selanjutnya pada bab ini akan lebih menjelaskan mengenai aplikasi dari variabel yang terdapat pada teori TAN, yaitu untuk melihat upaya penggerakan *mahasiswa* dalam mengubah perilaku negara melalui kemampuan untuk memobilisasi informasi politik *(information politics)* dan simbolik *(symbolic politics)*. Kemudian mengidentifikasi keterlibatan aktor yang memiliki kekuatan lebih kuat *(leverage politics)*, dan juga mendorong aktor yang memiliki kekuatan lebih kuat agar dapat mempertanggung jawabkan kebijakan maupun prinsip yang telah dibuat *(accountability politics)*.

Dalam implementasi keempat variabel diatas dengan upaya penegakan demokrasi di Thailand, Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor ini dapat melalui keempat variabel diatas. Ketika *mahasiswa* merespon suatu fenomena yang terjadi, mereka dapat menyampaikan apa yang mereka rasakan dan inginkan dengan memobilisasi informasi politik kepada massa. Ketika mereka merasa tindakan tersebut masih belum memberikan kesadaran kepada masyarakat, maka mereka akan menggunakan strategi kedua

yaitu dengan menggunakan simbol-simbol, dimana aktor-aktor akan membingkai suara peristiwa secara simbolik agar pesannya dapat sampai kepada masyarakat. Jika kedua cara diatas kurang efektif, makan para aktor bisa mendorong aktor-aktor dengan kekuatan lebih kuat agar ikut berperan serta memperkuat pergerakan ini. Jika pergerakan ini berhasil melibatkan aktor-aktor yang kuat hingga terbentuknya kebijakan atau prinsip-prinsip, mereka juga dapat melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan atau prinsip-prinsip yang dibuat oleh aktor-aktor yang kuat.

Maka dari itu, penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi dari variabel teori TAN akan dijabarkan pada tiga subbab. Dimana, subbab pertama akan membahas terkait tindakan represif negara. Pada sub bab kedua akan membahas mengenai respon dari mahasiswa melalui empat variabel atau strategi yaitu *information politics, symbolic politics, leverage politics,* dan *accountability politics*. Kemudian pada sub bab ketiga akan melihat bagaimana hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam upaya penegakan demokrasi di Thailand pada masa PM Prayuth Chan-ocha tahun 2014-2020. Melalui *boomerang pattern* yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink. Berikut analisis *boomerang pattern* dengan menggunakan empat strategi yang diterapkan oleh jaringan advokasi di Thailand:

Gambar 2. Boomerang Pattern (Three Levels of Transnational Activism)



Sumber: (Keck &Sikkink, 1999, p. 93)

3.1 Tindakan Represif dari Negara (*Represieve State*)

Dalam ilustrasi di atas, ketika kudeta yang dilakukan oleh PM Prayuth Chan-ocha berhasil dan militer mendominasi perpolitikan di Thailand, diwaktu yang sama juga pemerintahan di bawah Prayuth Chan-ocha menggunakan aksi-aksi represif *(repressive state)* seperti adanya kekerasan baik secara mental maupun fisik untuk merespon aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Thailand. Keterlibatan Junta militer secara langsung menjadikan Jenderal Prayuth Chan-ocha sebagai Perdana Menteri Thailand dan juga mempengaruhi mekanisme perpolitikan dan pemilihan umum yang ada di Thailand seperti memiliki kewenangan dalam memilih senat, ketersediaan kursi untuk militer, hingga pengaruh yang signifikan terhadap lembaga penting lainnya yang justru semakin mengikis nilai-nilai demokrasi (Kongkirati, 2018, p. 363-365).

Selain itu, Junta militer dan Prayuth juga terlibat dalam menentukan tanggal pemilihan umum serta mengontrol jalannya pemilihan umum, seperti melakukan penundaan terhadap pemilihan umum. Pada tahun 2009 dan 2010 di Bangkok, Front Persatuan untuk Demokrasi melawan Kediktatoran/*the United Front for Democracy against Dictatorship* (UDD) menjadi bukti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer, di mana militer membantu pemerintah dengan memukul mundur para pengunjuk rasa yang mengakibatkan lebih dari 90 orang meninggal dan 2.000 mengalami. Luka-luka. Dalam rentang 29 Januari-11 Mei 2014, dilaporkan bahwa terjadi 32 serangan bom di sekitar tempat protes yang berujung pada 25 orang tewas dan 800 orang mengalami luka-luka. NCPO juga membungkam hak-hak politik dan kebebasan sipil. Tidak hanya itu, kelompok oposisi ditindas dan para anggotanya diintimidasi hingga dipenjara.

3.2 Respon Mahasiswa Terhadap Tindakan Represif Negara (*Domestic Activists*)

Dalam lingkup domestik, terdapat aktivis domestik yang merupakan masyarakat sipil Thailand, seperti mahasiswa, organisasi regional, hingga media. Ketika terjadi eksploitasi dan aksi represif dari pemerintah, maka masyarakat akan melakukan upaya untuk menegakkan hak-hak mereka dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mereka dapatkan dan nikmati. Oleh karena itu, *civil society* tidak hanya menggunakan strategi informasi politik untuk menyebarkan apa yang sebenarnya terjadi di Thailand, melainkan mereka juga menggunakan strategi yang lebih modern dan mudah untuk diterima oleh masyarakat baik nasional maupun global. Adapun strategi yang digunakan menurut Keck dan Sikkink ialah:

3.2.1 *Information Politics*/Politik Informasi

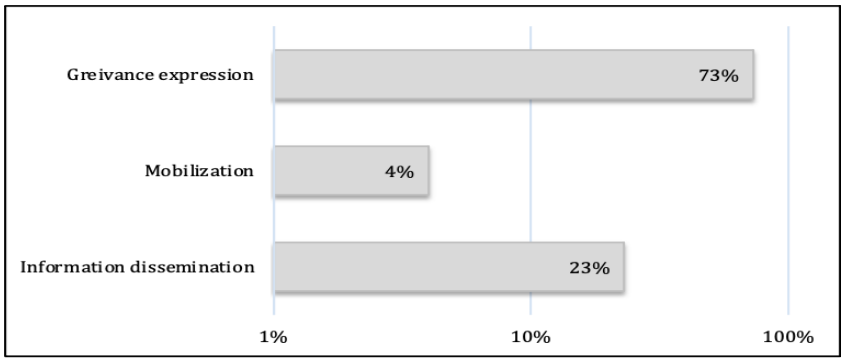
Politik informasi merupakan bagian penting dalam pergerakan *mahasiswa*. Cara ini menjadi alat pertama yang digunakan oleh *mahasiswa*, khususnya dalam lingkup jaringan advokasi. Informasi merupakan hal yang fundamental dalam mengukur keberhasilan sebuah jaringan advokasi yang sifatnya transnasional. Dalam tulisannya, Keck dan Sikkink mengatakan bahwa kemampuan untuk menghasilkan informasi secara efisien dan efektif merupakan *"the most valuable trading currency"* pada jaringan advokasi transnasional. Dalam kasus Thailand, jaringan advokasi mahasiswa, media, hingga LSM kerap melakukan strategi politik informasi ini dengan langsung terjun ke masyarakat maupun menggunakan platform media.

Sejak kudeta yang dilakukan oleh Prayuth Chan-o-cha pada 2014, masyarakat Thailand harus hidup dibawah kekuasaan militer, dimana hak-hak dasar dan kebebasan mereka dibatas termasuk kebebasan pers. Junta Militer atau NCPO memanggil setidaknya 35 wartawan dengan tujuan "penyesuaian sikap" serta menuntut 14 wartawan dengan dakwaan bermotif politik. Melalui NCPO, perintah yang dikeluarkan tercantum dalam No. 97/2557 dan No. 103/2557 yang secara terang-terangan melarang media maupun individu baik media lokal maupun media sosial untuk menyalurkan informasi yang dianggap sebagai informasi kebencian, informasi palsu, atau informasi yang bertujuan untuk mendiskreditkan Junta. Perintah ini menjadi titik dimana media di Thailand dibatasi dan mengikis kebebasan media. Mereka tidak boleh mengkritik otoritas militer serta kerajaan (Wannasiri, 2018).

Ketidakefektifan media massa ini tidak membuat jaringan advokasi di Thailand menjadi lumpuh, mereka memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk mendistribusikan politik informasi kepada masyarakat Thailand dan dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi di Thailand. Upaya masyarakat dalam menggunakan media sosial ini dapat dilihat dari penggunaan tagar *#FreeYouth* baik di Twitter maupun di Facebook. Kampanye melalui media sosial ini menjadi babak baru dalam sejarah protes Thailand. Keterlibatan mahasiswa hingga pelajar di sekolah menengah turut bergabung dalam menyampaikan situasi yang terjadi di Thailand. Mereka menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyampaikan opininya terkait kasus kudeta dan juga kekejaman yang dilakukan militer.

Melalui media sosial Twitter inilah mahasiswa dapat dengan bebas untuk bertukar pendapat dan mengkritik pemerintahan. Tercatat dalam sejarah bahwa aksi menaikan tagar di Twitter berhasil menjadi kendaraan politik mahasiswa untuk mengkritik kerajaan dan militer. Berikut data yang menunjukan penggunaan tagar *#FreeYouth* di Twitter:

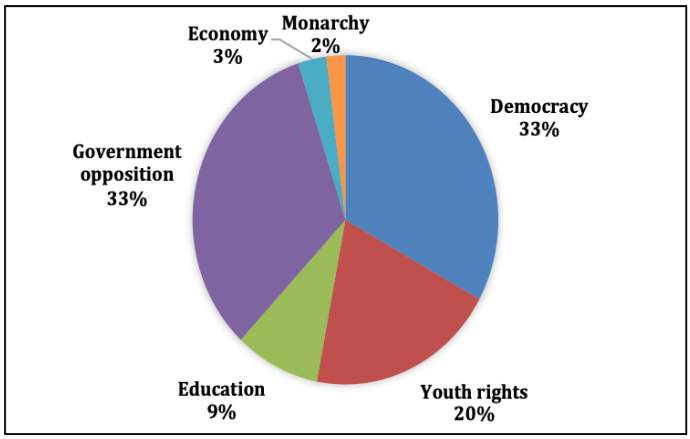
Grafik 1. Persebaran Topik Penggunana Tagar #FreeYouth di Twitter



Sumber: (Sinpeng, 2021, p. 7)

Dari data diatas, sebanyak 73% tagar digunakan untuk mengungkapkan keluhan serta alasan mereka berpartisipasi dalam kampanye ini. Mereka banyak yang mengeluhkan lemahnya demokrasi di Thailand serta hak-hak pemuda. Sedangkan di urutan kedua sebanyak 23% tagar digunakan untuk mendistribusikan informasi terutama terkait aksi protes di Thailand. Terakhir, sebanyak 4% digunakan untuk memobilisasi masyarakat untuk melakukan protes offline. Tagar ini juga memiliki beberapa narasi utama yang mereka bicarakan di Twitter, yaitu:

Diagram Lingkaran 1. Persebaran Topik Penggunaan Tagar #*FreeYouth* di Twitter



Sumber: (Sinpeng, 2021, p. 9)

Gambar ini menunjukan penggunaan tagar *#FreeYouth* banyak digunakan dalam membahas isu demokrasi dan mereka juga berperan sebagai oposisi negara. Dalam gambar kita juga bisa melihat masyarakat membahas tentang ketimpangan ekonomi, hak-hak mereka sebagai anak muda, pendidikan, hingga masalah kerajaan.

Melalui platform media baik media massa maupun media sosial, keduanya memberikan peran yang sangat signifikan bagi *mahasiswa* dalam upaya penegakan demokrasi di Thailand. Semua elemen masyarakat terlibat dari kelompok anti pemerintah seperti baju merah, mahasiswa, media, hingga LSM. Meskipun media massa seperti televisi dan para jurnalis terikat oleh peraturan militer, masyarakat Thailand tetap memiliki cara agar pesan yang ingin mereka sampaikan ke masyarakat global dapat tersampaikan melalui media sosial. Strategi pendistribusian politik informasi ini menjadi langkah awal bagi jaringan advokasi untuk terhubung satu sama lain. Mereka dapat bertukar informasi dan juga pengalaman tentang permasalahan yang terjadi di Thailand. Sesuai dengan penjelasan Keck dan Sikkink, bahwa politik informasi merupakan *"the most*

valuable trading currency" yang bermakna bahwa pertukaran informasi merupakan suatu hal yang sangat berharga.

Media merupakan mitra yang sangat penting dalam strategi politik informasi ini. Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, jaringan advokasi berusaha untuk menarik perhatian masyarakat dan juga pers. Ketika informasi tersebut tersampaikan, wartawan yang simpatik secara tidak langsung akan menjadi bagian dari jaringan advokasi. Melalui masyarakat dan pers, jaringan advokasi berharap permasalahan yang terjadi dapat dibingkai cepat, tepat, dan juga dramatis. Hal ini sesuai dengan yang terjadi di Thailand, dimana peran dari media memberikan efek yang besar bagi masyarakat, media media lokal dibatasi oleh militer dan pemerintah, namun informasi yang telah mereka berikan menjadi batu loncatan masyarakat untuk sadar dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Informasi dari media lokal juga sekaligus mengantarkan mereka kepada media sosial dan mulai untuk menyebarkan informasi di media sosial.

3.2.2 Symbolic Politics/Politik Simbolik

Strategi kedua yang dapat digunakan oleh jaringan advokasi adalah politik simbol. Menurut Keck dan Sikkink strategi ini dapat digunakan ketika terdapat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dan dibingkai secara simbolik dengan tujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dan juga untuk memperluas fondasi jaringan tersebut. Ketika strategi pertama yaitu politik informasi belum berhasil menyadarkan masyarakat tentang apa yang sedang terjadi, jaringan advokasi. Dapat bergeser pada strategi kedua yang menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda, aksi, dan juga cerita tertentu untuk menarik perhatian serta dukungan dari masyarakat (Keck & Sikkink, 2002, p. 96). Strategi ini berfungsi

untuk menyasar masyarakat yang posisinya jauh serta sehingga dapat memahami terkait perjuangan maupun permasalah yang terjadi melalui simbol-simbol ataupun cara-cara unik lainnya.

Penggunaan politik simbol dalam upaya penegakan demokrasi di Thailand menjadi sesuatu yang sangat mencolok dan mencuri perhatian masyarakat. Tidak hanya di Thailand, melainkan juga di beberapa negara. Sejak kudeta yang dilakukan 22 Mei 2014, beberapa minggu setelahnya sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes dengan menaikan salut tiga jari yang diadopsi dari film *The Hunger Games: Mockingjay Part 1*. Penggunaan isyarat ini bertujuan untuk menentang pemerintah yang otoriter di bawah kepemimpinan militer. Setidaknya terdapat 5 mahasiswa yang ditahan saat pidato PM Prayuth Chan-o-cha. Mereka menggunakan kaos yang bertuliskan *"we don't want the coup"* (Mydans, 2014). Aksi isyarat salut tiga jari *"The Hunger Games"* tidak hanya terjadi di satu tempat saja melainkan di beberapa tempat di Thailand. Setelah mahasiswa mengadopsi simbol tersebut, mereka juga menggunakan momentum season dua dari film *The Hunger Games* ketika tayang di Thailand. Para siswa berinisiatif membagikan tiket secara gratis di bioskop di pusat kota Bangkok. Meskipun pihak bioskop menolak siswa masuk ke dalam bioskop (BBC, 2014).

Selain penggunaan simbol salut tiga jari, di minggu yang sama setelah kudeta terjadi, beberapa pengunjuk rasa juga membaca buku di sepanjang jalan di Bangkok. Mereka membaca sebagai bentuk dari perlawanan terhadap pemerintah yang otoriter. Beberapa pengunjung membaca buku dengan judul Nineteen Eighty-Four karya George Orwell's (Pitman, 2014). Aksi yang dilakukan oleh aktivis dengan cepat ditindak oleh militer dengan melarang masyarakat membaca

buku tersebut, serta beberapa aktivis ditangkap untuk "penyesuaian sikap". Dikarenakan banyaknya kasus akibat adanya pertemuan politik seperti kasus diatas, akhirnya mahasiswa di beberapa universitas seperti Universitas Thammasat dan Universitas Kasetsart mengorganisir *"sandwich party".* Aksi protes *sandwich* in dilakukan mahasiswa karena polisi melarang dan menetapkan darurat militer sehingga mereka para protester tidak bisa membagikan selebaran. Sayangnya ide *"sandwich party"* ini menyebar dengan cepat dan militer akhirnya menahan beberapa mahasiswa dengan tuduhan aksi tersebut mengandung niat politik serta menghimbau masyarakat bahwa tindakan seperti itu adalah tindakan kriminal (Haworth, 2015).

Politik simbol yang terjadi di Thailand sejak kudeta 2014 setidaknya telah berlangsung hingga 2015. Selain aksi politik simbol diatas, mahasiswa juga menggunakan seni sebagai media mereka dalam melakukan aksi protes. Sebagai contoh ketika seorang sejarawan pro-demokrasi Universitas Thammasat dipaksa untuk mengundurkan diri, terdapat delapan mahasiswa yang membagikan puisi karya Chit Phumisak, penyair Thailand sekaligus pemberontak komunis. Penggunaan politik simbol seperti simbol salut tiga jari selalu digunakan setiap tahunnya untuk mewakili aksi protes yang dilakukan oleh *mahasiswa*. Pada tahun 2018, bertepatan dengan peringatan ulang tahun keempat kudeta militer, para pengunjuk rasa bernyanyi dan juga menari di depan kerumunan polisi sembari mengangkat tiga jarinya. Mereka mengecam dan mendesak pemerintah untuk menyerukan pemilihan dadakan di tahun ini, sayangnya aksi mereka dihentikan oleh polisi, polisi mengusir media dan juga menahan beberapa aktivis (Beech, 2018).

Selain itu, penggunaan simbol salut tiga jari juga dilakukan pada 2019, ketika ribuan orang berkumpul untuk melakukan protest terbesar di Bangkok yang diakibatkan oleh pelarangan sebuah partai oposisi yang menentang pemerintahan Prayuth Chan-o-cha. (CNA, 2019). Politik simbol lainnya yang sekarang menjadi ciri khas dari aksi protes di Thailand adalah penggunaan pelampung bebek raksasa berwarna kuning *"yellow ducks inflatable"* yang digunakan pengunjuk rasa ketika mereka dipukul mundur oleh polisi dengan menembaki gas air mata dan juga meriam air di halaman parlemen Bangkok (Bangkok Post, 2020).

Penggunaan politik simbol ini menunjukan bagaimana masyarakat dapat mendistribusikan informasi dengan cara yang lebih kreatif serta dapat menarik perhatian banyak orang. Upaya yang dilakukan oleh *mahasiswa* di Thailand dengan menggunakan politik simbol tentu saja menimbulkan kekhawatiran, dimana mereka lebih mudah terekspos baik di media lokal maupun media sosial. Hal ini membuat pemerintah dan militer dengan mudah mencari mereka. Namun, penggunaan politik simbol ini merupakan strategi yang efektif untuk menarik banyak perhatian massa. Aksi demonstrasi dengan menggunakan politik simbol ini menjadi viral di berbagai negara melalui media internasional dan juga media sosial yang memudahkan jaringan advokasi untuk menyampaikan tuntutan dan apa saja yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat global. Oleh karena itu, beberapa tuntutan seperti menuntut PM Prayuth Chan-o-cha mengundurkan diri dari jabatannya, merancang ulang konstitusi terkait militer, hingga reformasi politik berhasil mendapatkan sorotan dari masyarakat. Hal ini tentu saja merupakan salah satu keberhasilan penggunaan politik simbol.

3.2.3 *Leverage Politics*/Politik Pengaruh

Dalam melakukan upaya penegakan demokrasi di Thailand, dua strategi yang telah digunakan oleh jaringan advokasi yaitu politik informasi dan juga politik simbol berperan penting dalam memberikan tekanan *(pressure group)* kepada pemerintah Thailand. Meskipun kedua strategi ini dalam perjalanannya dirasa kurang efektif dalam menarik perhatian pemerintah Thailand untuk melihat kembali tuntutan mereka atau apa yang mereka inginkan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer junta baik dalam hal kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan lainnya. Selain itu, jaringan advokasi juga mengalami beberapa hambatan dalam upaya penegakan demokrasi yang mereka lakukan ketika berhadapan dengan aspek hukum di Thailand yaitu hukum lese majeste atau hukum yang melarang penghinaan terhadap keluarga kerajaan dan juga pemerintahan Thailand. Oleh karena itu, strategi ketiga yang dapat digunakan oleh jaringan advokasi adalah *leverage politics*.

Leverage politics merupakan strategi yang mendorong keterlibatan aktor-aktor yang memiliki kuasa lebih kuat dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan negara maupun berperan dalam memperkuat pergerakan jaringan advokasi. Menurut Robert C. Blitt, penggunaan strategi *leverage politics* ini dapat dikatakan efektif tergantung pada kemampuan jaringan advokasi dalam mempersuasi dan menekan aktor yang ditargetkan untuk mengubah perilakunya (Blitt, 2004, p. 290). Dalam tulisannya, Keck dan Sikkink mengklasifikasikan leverage politics menjadi dua jenis yaitu material *(material laverage)* dan juga moral *(moral leverage)*. Material dapat berupa barang, uang, dan keuntungan

lainnya. Sedangkan, moral merujuk pada *"mobilization of shame",* yang bertujuan menempatkan perilaku aktor yang menjadi target sebagai pusat perhatian internasional (Keck & Sikkink, 2002, p. 97).

Adapun pengaruh moral yang digunakan oleh jaringan advokasi dalam kasus Thailand adalah masalah yang berkonteks pada hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan kondisi demokrasi di Thailand, dimana masyarakat tidak memiliki kebebasan, khususnya dalam ruang politik. Mereka tidak boleh berkumpul jika ada unsur politik, mereka juga tidak boleh berkomentar tentang pemerintahan militer di bawah PM Prayuth Chan-o-cha dan tidak boleh mengkritik kerajaan. Pengaruh moral inilah yang kemudian menjadi landasan bagi jaringan advokasi untuk mempengaruhi aktor-aktor yang kuat dalam hubungan internasional seperti aliansi-aliansi pergerakan di beberapa negara, LSM, hingga organisasi internasional seperti PBB.

Melalui moral leverage jaringan advokasi berhasil menarik perhatian dari organisasi internasional seperti PBB, dimana PBB menunjuk dan mengirim beberapa ahli hak asasi manusia untuk mengawasi situasi konflik di Thailand pada tahun 2020. Para ahli ini mendesak pemerintah Thailand untuk menjamin hak-hak dasar berkumpul secara damai dan juga menegaskan terkait hak kebebasan berbicara. Ahli hak asasi manusia ini juga menilai bahwa pemberlakuan keadaan darurat di Thailand merupakan "tindakan yang kejam", dimana mereka meminta pemerintah dan juga militer untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap para demonstran (UN News, 2020). Sejatinya, keterlibatan PBB dalam melihat situasi konflik di Thailand sudah sejak kudeta dilakukan tahun 2014, komisaris tinggi PBB Navi Pillay mengatakan bahwa dia sangat prihatin atas apa yang

menimpa Thailand dan juga dia menghimbau bahwa apapun yang dilakukan oleh militer dan pemerintah harus sesuai dengan standar hak asasi manusia (Fretwell, 2014).

Selain PBB, beberapa LSM juga turut serta mendesak pemerintah dan militer Thailand. Beberapa LSM pro-demokrasi mengeluarkan statement dalam mendukung aksi masyarakat. Beberapa LSM internasional seperti *Amnesty International, Asia Democracy Network, Civil Right Defenders, Fortify Rights, Human Right Watch*, dan masih banyak lagi mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh militer dan polisi Thailand. Adapun LSM lainnya seperti *International federation for Human Rights, Union for Civil Liberty, Internet Law Reform Dialogue, International Commission of Jurists, dan Thai Lawyer for Human Rights* pada tanggal 29 Maret 2017, sesi ke-119 Komite Hak Asasi Manusia PBB, Jenewa. Para LSM mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk pemerintahan Thailand. Mereka menyoroti kekerasan dan pembatasan terhadap hak asasi manusia di Thailand (OHCHR, n.d.).

Jaringan advokasi juga berhasil menarik perhatian dan partisipasi beberapa aliansi pergerakan *mahasiswa* dari negara lain. Tagar *#StandWithThailand* sempat menjadi trending di beberapa negara seperti Hongkong dan Taiwan. Hongkong, Taiwan, dan Thailand merupakan anggota dari *Milk Tea Alliance* yang merupakan koalisi pro-demokrasi yang dijalankan secara online. Salah satu kontribusi dari aliansi ini adalah pengadaan petisi online melalui Change.org dengan tujuan menggalang dukungan internasional bagi gerakan perlawanan di Thailand. Petisi ini berhasil tembus 23.000 orang dalam waktu empat hari. Berkat dukungan dari aliansi internasional ini, dimana mereka menekan pemerintah melalui petisi dan

juga kampanye online melalui tagar-tagar yang tersebar di media sosial membuat pemerintah Thailand khususnya militer tidak lagi memobilisasi meriam air selama protes berlangsung di Thailand pada saat-saat tertentu (Siu, 2020).

Adanya dampak yang diberikan oleh masyarakat global terhadap upaya pergerakan *mahasiswa* di Thailand, tentu saja merupakan hal yang sangat membantu jaringan advokasi dalam menekan pemerintah Thailand. Meskipun tekanan yang diberikan oleh jaringan advokasi tidak dapat membuat pemerintah memenuhi tuntutan mereka, bahkan pemerintah juga seolah tidak peduli dengan tekanan-tekanan yang diberikan baik dari masyarakat Thailand maupun dari masyarakat global. Melalui *leverage politics* juga jaringan advokasi mampu menggerakkan massa secara global melalui bantuan dari aliansi internasional seperti Milk Tea Alliance, mereka juga mampu mempengaruhi organisasi internasional untuk ikut turun tangan memantau situasi yang terjadi di Thailand. Beberapa LSM juga turut serta memberikan kontribusinya untuk membantu memberikan rekomendasi kepada *Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* terkait situasi pemerintahan di Thailand. Selali itu, melalui demonstrasi di Thailand, beberapa aliansi pro-demokrasi akar rumput bermunculan di Asia Tenggara dan Asia. Misalnya penggunaan tagar seperti *#WhatsHappeningInThailand*, memicu beberapa negara untuk menaikkan tagar serupa, seperti di Laos ada *#IfLaosPoliticsWasGood*. Dukungan-dukungan ini yang membuat pergerakan massa di Thailand menjadi besar dan memberikan tekanan kepada pemerintah, seperti keinginan untuk menurunkan Jenderal Prayuth Chan-o-cha dari jabatannya serta tuntutan-tuntutan yang dilayangkan kepada kerajaan.

3.2.4 *Accountability Politics*/Politik Akuntabilitas

Politik akuntabilitas adalah strategi terakhir bagi jaringan advokasi dalam memantau komitmen pemerintah terhadap kesepakatan yang telah dibuat agar tidak menyimpang. Melalui strategi ini, *mahasiswa* memastikan bahwa upaya yang mereka lakukan baik dalam strategi *information politics, symbolic politics, dan leverage politics* dapat diawasi sehingga peran *mahasiswa* sebagai *pressure group* diharapkan dapat memantau komitmen dari pemerintah. Melalui strategi ini jaringan advokasi berperan untuk mengontrol dan mengamati kesepakatan dan juga praktik dari apa yang telah dikatakan oleh pemerintah. Ketika pemerintah berhasil ditekan terkait suatu isu, misalnya isu terkait hak asasi manusia, pemerintah akan menunjukkan kecenderungan untuk mengeluarkan pernyataan yang kemudian dapat digunakan oleh jaringan advokasi sebagai peluang politik akuntabilitasnya (Keck & Sikkink, 2002, p. 97-98).

Dalam kasus upaya penegakan demokrasi di Thailand, khususnya pada masa PM Prayuth Chan-o-cha, jaringan advokasi belum berhasil dalam menekan pemerintah untuk bertindak dan merespon tuntutan-tuntutan mereka. Beberapa pengunjuk rasa menyampaikan 10 tuntutan mereka untuk mereformasi politik, dimana melalui ketiga strategi diatas yaitu *information politics, symbolic politics, dan leverage politics* mereka mampu menarik puluhan ribu orang dari berbagai kalangan untuk bergabung dan menuntut pemerintahan serta militer (Tostevin & Birsel, 2020). Mereka juga menginginkan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth, pembubaran parlemen serta perubahan konstitusi. Masyarakat menginginkan demokrasi serta mengakhiri pemerintahan yang diktator (Mahtani, 2020). Meskipun jaringan advokasi berhasil untuk mendistribusikan informasi

terkait situasi yang terjadi di Thailand, hingga mendapatkan banyak dukungan baik nasional maupun internasional, namun mereka belum berhasil membuat pemerintah untuk merubah posisi pemerintah.

3.3 Lese Majeste Sebagai Penghambat Pergerakan Mahasiswa (*Blockage*)

Salah satu hambatan bagi jaringan advokasi di Thailand dalam upaya mereka untuk menegakkan demokrasi di Thailand adalah adanya hukum lese majeste yang membatasi ruang gerak mereka. Lese majeste menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah dan militer dapat bertindak menyalahi ketentuan hak asasi manusia seperti melakukan penangkapan, menutup akses bagi kebebasan berkumpul dan berpendapat, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Lese majeste atau hukum yang melarang penghinaan terhadap keluarga kerajaan dan juga pemerintahan Thailand inilah yang membuat pergerakan *mahasiswa* di Thailand masih berlangsung hingga sekarang. Para demonstran juga tidak segan untuk menentang hukum ini dengan alasan bahwa hukum ini hanya sebuah alat politik bagi pemerintah Thailand khususnya kerajaan dan militer untuk menekan masyarakat agar tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Berdasarkan hukum lese majeste, kerajaan dilindungi oleh pasal 112 KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang mencemarkan nama baik, menghina, bahkan mengancam raja, ratu, pewaris, ataupun bupati akan dipenjara selama 3 hingga 15 tahun (Tostevin & Birsel, 2020).

Meski lese majeste menjadi tameng bagi pemerintah, melalui *leverage politic* jaringan advokasi mampu mempengaruhi dan memperoleh massa dari berbagai negara, upaya yang mereka lakukan membawakan hasil pada bagaimana negara lain mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Thailand, bagaimana

keadaan hak asasi manusia dia, hingga menyorot pemerintahan yang otoriter. Penggunaan hukum lese majeste oleh PM Prayuth untuk mengancam masyarakat Thailand dan juga membungkam mereka untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya. Salah satu bukti kekejaman hukum ini adalah ketika salah satu mahasiswa yang memimpin demonstrasi yaitu Panusaya yang dituntut sembilan kasus lese majeste atau bisa mencapai 135 tahun penjara. Selain Panusaya, Parit Chiwarat atau Pinguin juga dijerat dengan 22 kasus lese majeste atau setara dengan 330 tahun penjara (Ratcliffe, 2021). Namun, adanya lese majeste tidak membuat upaya pergerakan *mahasiswa* di Thailand berakhir. Mereka tetap melakukan aksi demonstrasi untuk memukul mundur militer dan juga untuk membuktikan bahwa masyarakat memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi seperti kebebasan mereka dalam berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan lain sebagainya.

Sayangnya, strategi keempat yaitu politik akuntabilitas belum sepenuhnya efektif karena kasus yang terjadi di Thailand masih berlangsung hingga saat ini dan perjuangan *mahasiswa* juga terhambat dengan adanya hukum lese majeste hukum yang melarang penghinaan terhadap keluarga kerajaan dan juga pemerintahan Thailand, hukum ini membatasi ruang gerak masyarakat dengan memberikan Batasan-batasan yang justruk menindas hak asasi masyarakat. Sehingga, ketika dihadapkan dengan batasan atau rintangan *(Blockage)* dalam hal ini hukum lese majeste yang akan mempengaruhi agenda-agenda mereka terhadap pemerintah di negara yang mereka tinggali mereka dapat meminta bantuan dari aktor yang memiliki kekuatan lebih besar. Hal ini dapat terlihat dalam kasus

Thailand, bagaimana masyarakat kesulitan untuk menyampaikan tuntutan mereka dan menekan pemerintah karena adanya hukum lese majeste.

Dengan demikian, ketika berhadapan dengan *blockage* dalam tingkat lokal, masyarakat Thailand bisa meminta bantuan/*appeal support* kepada LSM di luar dari negaranya seperti *Amnesty International, Asia Democracy Network, Civil Right Defenders, Fortify Rights, Human Right Watch*, *International federation for Human Rights, Union for Civil Liberty, Internet Law Reform Dialogue, International Commission of Jurists, dan Thai Lawyer for Human Rights.* Masyarakat Thailand juga meminta bantuan dari organisasi internasional seperti PBB, dimana PBB menunjuk dan mengirim beberapa ahli hak asasi manusia untuk mengawasi situasi konflik di Thailand pada tahun 2020. Selain itu, bantuan dari aliansi pergerakan dari negara lain juga berperan penting seperti adanya bantuan dari *Milk Tea Alliance* di Taiwan dan Hongkong.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kudeta yang terjadi sejak tahun 2014, dimana ketika Jenderal Prayuth Chan-ocha berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya dengan bantuan dari *The National Council for Peace and Order (NCPO)*/junta militer. Meskipun kudeta bukanlah hal yang baru di Thailand, namun kudeta tahun 2014 merupakan bukti kuat bagaimana dominasi militer masih mempengaruhi perpolitikan dan demokrasi di Thailand. Tentu saja dominasi militer ini memberikan dampak buruk bagi nilai-nilai demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat Thailand. Dengan terpilihnya Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri Thailand, serangkaian kecurangan dan eksploitasi terhadap politik dan demokrasi semakin marak terjadi. Adanya pengambilan kekuasan tanpa melalui pemilihan umum merupakan salah satu bentuk rusaknya demokrasi.

Sebagai negara demokrasi berdasarkan konstitusi kerajaan Thailand tahun 2007 Bab 1 ayat 2 menyatakan bahwa Thailand mengadopsi rezim pemerintahan yang demokrasi dengan Raja sebagai kepala Negara, tentu saja kudeta membuat masyarakat marah dan menginginkan adanya pemilihan yang demokrasi. Militer dengan leluasa menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan masyarakat serta menyalahgunakan kekuasaan negara untuk membungkam hak-hak masyarakat, mempengaruhi mekanisme perpolitikan, dan pemilihan umum yang ada di Thailand seperti memiliki kewenangan dalam memilih senat, ketersediaan kursi untuk militer, hingga pengaruh yang signifikan terhadap lembaga penting lainnya yang justru semakin mengikis nilai-nilai demokrasi.

Adanya seraingkaian kecurangan dan kekerasan terhadap perpolitikan serta nilai-nilai demokrasi membuat masyarakat Thailand melakukan aksi unjuk rasa menuntut adanya reformasi dengan 10 tuntutan serta menginginkan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, pembubaran parlemen serta perubahan konstitusi. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil Thailand tentu saja merupakan upaya yang dilakukan masyarakat guna menegakan demokrasi di negaranya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat sipil di Thailand menggunakan berbagai macam strategi yang melibatkan banyak pihak baik mahasiswa, media, LSM, organisasi internasional, hingga aliansi pergerakan nasional.

Dalam menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* yang diperkenalkan oleh Keck dan Sikkink. Lebih tepatnya pada penelitian ini akan menerapkan konsep *boomerang pattern* dengan menggunakan beberapa strategi untuk melihat upaya masyarakat Thailand dalam penegakkan demokrasi. Dengan konsep ini, Keck dan Sikkink menjelaskan tentang empat strategi guna melihat bagaimana hubungan antara masyarakat dengan negara, keempat strategi tersebut adalah information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Melalui keempat strategi ini kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari mahasiswa terhadap upaya penegakkan demokrasi di Thailand, khususnya pada masa Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha pada tahun 2014-2020.

Pada Bab II, penulis menjelaskan terkait peran gerakan *mahasiswa* dalam merespon permasalahan demokrasi di Thailand dengan menyajikan beberapa kronologi situasi politik dan demokrasi di Thailand pada tahun 2014-2020. Pada

Bab II juga penulis juga menjelaskan bagaimana pergerakan *mahasiswa* muncul dan tujuan dari pergerakan tersebut. Penulis memaparkan bagaimana peran dari actor-aktor khususnya masyarakat Thailand yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat, mahasiswa, media, hingga LSM dalam upaya mereka melalui demonstrasi untuk menegakkan demokrasi di Thailand. Selain itu, peran dari masyarakat global juga sangat penting untuk membantu penegakkan demokrasi di Thailand. Pada Bab II, penulis juga menjelaskan bagaimana dampak dari pergerakan *mahasiswa* tersebut terhadap pemerintahan terutama pada masa Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.

Sementara itu pada Bab III, penulis menganalisis. Keempat strategi dari *boomerang pattern* yaitu information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Upaya yang dilakukan masyarakat Thailand selain menggunakan informasi yang dibantu oleh media local dan nasional guna menyebarkan apa yang sebenarnya terjadi di Thailand, masyarakat Thailand juga menggunakan simbol-simbol tertentu yang membantu mereka mendistribusikan aspirasi mereka dengan strategi yang lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, masyarakat sipil di Thailand juga menggunakan strategi politik pengaruh dan politik akuntabilitas, dimaan *mahasiswa* mendorong keterlibatan aktor-aktor yang memiliki kuasa lebih kuat dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan negara maupun berperan dalam memperkuat pergerakan jaringan advokasi, selain itu *mahasiswa* juga mendorong dan memantau komitmen pemerintah terhadap kesepakatan yang telah dibuat agar tidak menyimpang.

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink, melalui konsep TAN ini, upaya yang dilakukan oleh *mahasiswa* di Thailand dapat dikatakan

terimplementasi dengan baik untuk ketiga strategi yaitu information politics, symbolic politics, dan leverage politics. Dimana *mahasiswa* mampu menekan atau berperan sebagai *pressure group* bagi pemerintah melalui kolaborasi dan integrasi antar masyarakat. *Mahasiswa* mampu mendistribusikan aspirasi mereka melalui peran dari media nasional dan internasional, penggunaan symbol yang cukup identik, peran dari masyarakat global, hingga adanya bantuan dari organisasi internasional. Selain itu, untuk strategi keempat yaitu *accountability politics*, *mahasiswa* belum berhasil untuk menekan pemerintah dengan tujuan untuk menghasilkan suatu kebijakan, norma, ataupun aturan terkait tuntutan yang mereka sampaikan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, tentunya masih memiliki keterbatasan, adanya saran dan rekomendasi diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya untuk memperkaya terkait kajian tema serupa.

Maka dari itu, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Adapun beberapa rekomendasi dari penulis yaitu:

1. Dikarenakan cakupan penelitian ini hanya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dari tahun 2014 hingga tahun 2020, sehingga hasil atau keefektifan dari strategi keempat yaitu *accountability politics* masih belum terlihat jelas memberikan dampak yang signifikan bagi perjuangan *mahasiswa* di Thailand. Maka dari itu penelitian selanjutnya akan sangat menarik jika membahas kelanjutan dari

perjuangan *mahasiswa* di Thailand yang masih berlangsung hingga sekarang.

2. Adanya hukum lese majeste di Thailand membuat perjuangan dari mahasiswa terhambat. Hukum lese majeste menjadi salah satu alat yang digunakan oleh kerajaan, perdana menteri, hingga militer untuk memukul mundur para pengunjuk rasa yang dapat berakhir pada hukuman penjara. Mengingat Thailand adalah negara demokrasi dan perlawanan yang sangat berani dari *mahasiswa* di Thailand terhadap kerajaan dan hukum lese majeste, membuat penelitian selanjutnya akan sangat menarik jika membahas bagaimana eksistensi dari hukum lese majeste berangsur menurun akibat tekanan-tekanan dari *mahasiswa* baik di Thailand maupun secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Amal, M. K. (2013, June). PERJUANGAN CIVIL SOCITY DALAM MEMPERLUAS RUANG DEMOKRASI DI ASIA. PERJUANGAN CIVIL SOCITY DALAM MEMPERLUAS RUANG DEMOKRASI DI ASIA, 3, 74-75. http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=824112&val=13388&title=%20PERJUANGAN%20CIVIL%20SOCIETY%20DALAM%20MEMPERLUAS%20RUANG%20DEMOKRASI%20DI%20ASIAhttp://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=824112&val=13388&title=%20PERJUANGAN%20CIVIL%20SOCIETY%20DALAM%20MEMPERLUAS%20RUANG%20DEMOKRASI%20DI%20ASIA

Buchanan, J. (2013, June 15). Translating Thailand's protests: an analysis of Red Shirt rhetoric. ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies, 6, 61. . https://doi.org/10.4232/10.ASEAS-6.1-4

Bunbongkarn, S. (2004). THE MILITARY AND DEMOCRACY IN THAILAND. In R. J. May & V. Selochan (Eds.), The Military and Democracy in Asia and the Pacific (p. 48). ANU Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbj1g.8

Connors, M. K. (2007). Democracy and National Identity in Thailand (1st ed.). NIAS Press. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:848532/FULLTEXT01.pdf

Constitution Drafting Commission. (2007). General Provisions. CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND. Retrieved November 19, 2020, from http://210.246.148.76/thaiquest/getFileProxy/comment.aspx?url=%2Fdata%2Foutsitedata%2Foutsite21%2Ffile%2FConstitution_of_the_Kingdom_of_Thailand.pdf

Fioramonti, L., & Heinrich, V. F. (2007, April). How Mahasiswa Influences Policy. CIVICUS Research Report. Retrieved November 20, 2020, from https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/224.pdf

Human Rights Watch. (2014, November 24). Thailand: Unending Repression 6 Months Post-Coup. Human Rights Watch. Retrieved November 19, 2020, from https://www.hrw.org/news/2014/11/24/thailand-unending-repression-6-months-post-coup

Kongkirati, P. (2018). HAUNTED PAST, UNCERTAIN FUTURE: The Fragile Transition to Military- Guided Semi-Authoritarianism in Thailand. Southeast Asian Affairs, 363-365. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26492786

Kongkirati, P., & Kanchoochat, V. (2018, July 30). The Prayuth Regime: Embedded Military and Hierarchical Capitalism in Thailand. TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 6(2), 1-5. https://doi.org/10.1017/trn.2018.4

Mahtani, S. (2020, August 16). Thai anti-government protesters rally in the thousands, as the challenge to the once-untouchable monarchy grows. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/thailand-anti-government-protests/2020/08/16/36ad8440-db9e-11ea-b4f1-25b762cdbbf4_story.html

Neher, C. D. (1996, 1). THE TRANSITION TO DEMOCRACY IN THAILAND. Asian Perspective, 20, 303-308. https://www.jstor.org/stable/42704109

Rosema, M., Denters, B., & Aarts, K. (2011). How Democracy Works: An Introduction. In How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies (p. 12). Amsterdam University Press. https://www.researchgate.net/publication/241875592_How_Democracy_Works_An_Introduction

Shaughnessy, M. F., & Sardoc, M. (2002, January). An Interview with Michael Walzer. Studies in Philosophy and Education, 21(1), 66. 10.1023/A:1014498110997

Sopranzetti, C. (2020, October 21). The protests in Thailand are making history. Aljazeera. https://www.aljazeera.com/opinions/2020/10/21/the-protests-in-thailand-are-making-history/

Thabchumpon, N. (2016, April). Contending Political Networks: A Study of the "Yellow Shirts" and "Red Shirts" in Thailand's Politics. Southeast Asian Studies, 5, 93-96. 10.20495/seas.5.1_93

Thyne, C. L., & Powell, J. M. (2014, April). Coup d'état or Coup d'Autocracy? How Coups Impact Democratization, 1950–2008. Foreign Policy Analysis, 12, 195-196. 10.1111/fpa.12046

Bangkok Post. (2020, December 4). Yellow ducks became protest symbol by accident. *The Bangkok Post*. https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2030183/yellow-ducks-became-protest-symbol-by-accident

BBC. (2014, June 14). #BBCtrending: Sandwiches, codes and salutes in Thailand. *BBC*. https://www.bbc.com/news/blogs-trending-27833824

Beck, J. (2020, November 26). *Thailand: statement by international NGOs on pro-democracy protests*. International Commission of Jurists. Retrieved December 21, 2021, from https://www.icj.org/thailand-statement-by-international-ngos-on-pro-democracy-protests/

Beech, H. (2018, May 22). Anniversary of Thai Coup Draws Uneasy Protest and Police Threats (Published 2018). *The New York Times*. https://www.nytimes.com/2018/05/22/world/asia/thailand-protest-coup-anniversary.html

Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI). (2020). *BTI 2020 Thailand Country Report: BTI 2020*. BTI Transformation Index. Retrieved December 18, 2021, from https://bti-project.org/en/reports/country-report/THA

Blitt, R. C. (2004, 1 9). Who Will Watch the Watchdogs? Human Rights Nongovernmental Organizations and the Case for Regulation. *Buffalo Human Rights Law Review*, *10*, 290-291. https://digitalcommons.law.buffalo.edu/bhrlr/vol10/iss1/5/

CNA. (2019, December 14). Thousands join biggest protest in years in Thai capital. *CNA*. https://www.channelnewsasia.com/asia/thailand-anti-military-rally-opposition-thanathorn-844811

Fretwell, S. (2014, May 23). UN official urges respect for human rights, restoration of rule of law following Thai coup. *UN News*. https://news.un.org/en/story/2014/05/469072-un-official-urges-respect-human-rights-restoration-rule-law-following-thai-coup

Glassman, J. (2019, November 12). Lineages of the Authoritarian State in Thailand: Military Dictatorship, Lazy Capitalism and the Cold War Past as Post-Cold War Prologue. *Journal of Contemporary Asia*, 0. https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1688378

Haworth, A. (2015, March 22). Bangkok's Big Brother is watching you | Thailand. *The Guardian*. https://www.theguardian.com/world/2015/mar/22/bangkok-big-brother-politics-ruling-party-democracy

Human Rights Watch. (2020, October 21). *Thailand: Outspoken TV Channel Banned*. Human Rights Watch. Retrieved January 11, 2022, from https://www.hrw.org/news/2020/10/21/thailand-outspoken-tv-channel-banned

Keck, M. E., & Sikkink, K. (2002, December 16). Transnational advocacy networks in international and regional politics*. *International Social Science Journal*, *51*(159), 96. https://doi.org/10.1111/1468-2451.00179

Kuhonta, E. M. (2008, May/June). The Paradox of Thailand's 1997 "People's Constitution". *Asian Survey*, *48*, 374. https://doi.org/10.1525/as.2008.48.3.373

Lorch, J. (2020, November). Elite capture, mahasiswa and democratic backsliding in Bangladesh, Thailand and the Philippines. *Democratization*, *28*, 87-89. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1842360

Mahtani, S. (2020, August 16). Thai anti-government protesters rally in the thousands, as challenge to the once-untouchable monarchy grows. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/thailand-anti-government-protests/2020/08/16/36ad8440-db9e-11ea-b4f1-25b762cdbbf4_story.html

Martin, C., & Jagla, L. (2013). *Integrating Diplomacy and Social Media: A Report of the First Annual Aspen Institute Dialogue on Diplomacy and Technology*. Aspen Institute.

Mehden, F. R. V. D. (1970, November 1). The Military and Development in Thailand. *Journal of Comparative Administration*, *2*(3), 324-325. https://doi.org/10.1177/009539977000200305

Mydans, S. (2014, November 20). Thai Protesters Are Detained After Using 'Hunger Games' Salute (Published 2014). *The New York Times*. https://www.nytimes.com/2014/11/21/world/asia/thailand-protesters-hunger-games-salute.html

OHCHR. (n.d.). *UN Treaty Body Database*. TreatyBody Internet - Home. Retrieved January 14, 2022, from https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx

Pitman, T. (2014, June 1). In junta-ruled Thailand, reading is now resistance. *TheJakartaPost*. https://www.thejakartapost.com/news/2014/06/01/in-junta-ruled-thailand-reading-now-resistance.html

Ratcliffe, R. (2021, November 10). Thai court rules calls for curbs on monarchy are 'abuse of freedoms'. *The Guardian*. https://www.theguardian.com/world/2021/nov/10/thai-court-rules-calls-for-curbs-on-monarchy-are-abuse-of-freedoms

Ratcliffe, R. (2021, November 23). Thai student accused of mocking king with crop top protest denied bail. *The Guardian*. https://www.theguardian.com/world/2021/nov/23/thai-student-accused-of-mocking-king-with-crop-top-protest-denied-bail

Sinpeng, A. (2021, February 28). Hashtag activism: social media and the #FreeYouth protests in Thailand. *Critical Asian Studies*, 2. https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1882866

Siu, P. (2020, October 25). Thai protests: is Milk Tea Alliance stirring global support? *South China Morning Post*. https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3106645/thailand-protests-milk-tea-alliance-stirring-global-support

Sombatpoonsiri, J. (2018, March). Securitization of civil resistance: Thailand's military junta and beyond. *Journal of Resistance Studies*, *1*, 92-93. https://www.researchgate.net/publication/324030810_Securitization_of_civil_resistance_Thailand's_military_junta_and_beyond

Sombatpoonsiri, J. (2021, February). *From Repression to Revolt: Thailand's 2020 Protests and the Regional Implications*. GIGA Hamburg. Retrieved December 24, 2021, from https://www.giga-hamburg.de/en/publications/23883153-from-repression-to-revolt-thailand-2020-protests-and-regional-implications/

South China Morning Post. (2020, October 20). Why are there protests in Thailand and what will happen next? *SCMP*. https://www.scmp.com/week-

asia/politics/article/3106250/why-are-there-protests-thailand-and-what-will-happen-next?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article&campaign=3106250

Thabchumpon, N. (2016, April). Contending Political Networks: A Study of the "Yellow Shirts" and "Red Shirts" in Thailand's Politics. *Southeast Asian Studies*, *5*, 95-97. 10.20495/seas.5.1_93

Tostevin, M., & Birsel, R. (2020, October 14). Explainer: What's behind Thailand's protests? *Reuters*. https://www.reuters.com/article/us-thailand-protests-reasons-explainer-idUSKBN2700IX

Tsunekawa, K., & Todo, Y. (Eds.). (2018). *Emerging States at Crossroads*. Springer Singapore.

UN News. (2020, October 22). Independent UN rights experts urge Thai government to allow peaceful protests. *UN News*. https://news.un.org/en/story/2020/10/1075972

Wannasiri, S. (2018, May 24). Four years on, press freedom in Thailand a casualty of military coup. *Fortify Rights*. https://www.fortifyrights.org/tha-inv-oped-2018-05-24/

.